

**MANAJEMEN PARTISIPASI KOMITE MADRASAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH
IBTIDAIYAH KURNIA HASAN SAMPIT**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Megister Pendidikan Islam



Oleh:

BUDIANUR
NIM 19013268

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Partisipasi Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Nama : BUDIANUR

NIM : 19013268

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Sudi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)

Palangka Raya, Mei 2021

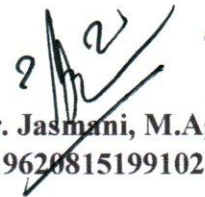
Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Tutut Sholihah, M.Pd
NIP. 1965811211985032001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Jasmani, M.Ag
NIP. 196208151991021001

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul : Partisipasi Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Nama : Budianur

NIM : 19013268

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Sudi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)

Palangka Raya, 2 Mei2021
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul Manajemen Partisipasi Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit Oleh Budianur NIM 19013268 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Syawal 1442 H / 26 Mei 2021 M

Palangka Raya, 26 Mei 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag**

Ketua Sidang

(.....)

2. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag**

Penguji Utama

(.....)

3. **Dr. Tutut Sholihah, M. Pd**

Penguji I

(.....)

4. **Dr. Jasmani, M. Ag**

Penguji II/Sekretaris Sidang

(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1002

ABSTRAK

Budianur. 2021. Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Komite madrasah merupakan mitra madrasah yang dibentuk berdasarkan hubungan masyarakat, orang tua, dan madrasah yang diadakan melalui rapat baik secara musyawarah maupun mufakat. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, memiliki beberapa masalah yaitu (1) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Madrasah. (2) Masyarakat masih dinilai kurang membantu dalam proses pendidikan. (3) Bantuan yang diberikan hanya terbatas pada hal pembiayaan pendidikan. (4) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam Madrasah. (5) Sebagian orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, (2) Bagaimana pelaksanaan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, dan (3) Bagaimana pengawasan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian adalah Ketua Komite dan informannya Kepala Madrasah, guru dan wali murid di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. Analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau data diverifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara: teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik

Hasil penelitian ini yaitu (1) Rencana Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit sejatinya selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah, (2) dalam hal pelaksanaan seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan financial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat, dan (3) pengawasan komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit bukan hanya seputar fasilitas madrasah tetapi meliputi kebijakan kepala Madrasah, prestasi atau kemampuan Individu siswa dan siswi baik dari segi akademik maupun non akademik, serta pengaruh dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dan siswi khususnya di Madrasah Kurnia Hasan Sampit.

Kata Kunci: Partisipasi, Komite, Madrasah

ABSTRACT

Budianur. 2021. Participation of the Madrasah Committee in the Implementation of Education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

The madrasah committee is a madrasah partner that is formed based on community, parent, and madrasah relationships which are held through meetings either by deliberation or consensus. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, has several problems, namely (1) There is still a lack of community participation in the construction of Madrasahs. (2) The community is still considered less helpful in the education process. (3) The assistance provided is only limited to financing education. (4) Low public awareness of the importance of participating in Madrasahs. (5) Some parents have a low educational background.

The formulation of the problems in this research are: (1) How is the plan of the Madrasah committee in improving the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, (2) how is the implementation of the participation of the Madrasah committee in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, and (3) how is supervision Madrasah committee participation in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

The results of this study are (1) The plan for the participation of the Madrasah committee in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit is actually always oriented to the development of a vision and mission such as developing the potential of students and students according to their interests and talents until plans to cooperate with government agencies, (2) in In terms of implementation, such as the support provided by the committee is not only limited to providing suggestions or deliberate consideration, but more than that is financial assistance both individually and collectively for the collection of community ideals, and (3) the supervision of the Madrasah Ibtidaiyah committee Kurnia Hasan sampit is not only about madrasah facilities but covers Madrasah principal policies, individual student and student achievement or abilities both academically and non-academically, as well as the influence and ability of teachers in the teaching and learning process which has a major influence on the success of students and students, especially at Madrasah Kurnia Hasan Sampit.

Keywords: Madrasah, Committee, Participation

KATA PENGANTAR



Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdallah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang juga telah banyak memberikan arahan dan petunjuk keilmuan selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag selaku Direktur dan Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang merupakan dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan serta memberikan kesempatan untuk kuliah di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Jasmani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI) Pascasarjana IAIN Palangka Raya sekaligus selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Dr. Tutut Sholihah, M.Pd selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan kemudahan layanan, pembinaan, arahan dan dukungan kepada penulis untuk selalu berkarya serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Israrulhaq S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan yang mau bekerja sama dan memberikan informasi, sehingga penelitian tentang manajemen partisipasi komite ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut memberikan motivasi dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan doa dan perhatiannya, penulis berharap semoga bermanfaat bagi semua. *Aamiin Yaa RobalAlamin.*



Palangka Raya, Mei 2021
Peneliti

BUDIANUR
NIM 19013268

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Budianur

NIM 19013268

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

(Q.S Al-Maidah, Ayat 2)



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Nota Dinas Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya	iv
Pengesahan Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Pernyataan Orisinalitas	ix
Motto.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Lampiran-Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
1. Peran dan Fungsi Komite.....	12
2. Konsep Dasar Partisipasi	21

3. Manajemen Partisipasi Komite Madrasah	36
a. Perencanaan Partisipasi Komite Madrasah	36
b. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah	37
c. Pengawasan Partisipasi Komite Madrasah	40
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	55
B. Prosedur Penelitian.....	66
C. Data dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	61
F. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	64
2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	65
3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	65
4. Keadaan Siswa Siswi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	66
5. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	66
6. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	67
7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan	68
8. Struktur Pengurus Komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit	70

B. Penyajian Data	70
1. Rencana partisipasi komite Madrasah	70
2. Pelaksanaan partisipasi komite Madrasah	74
3. Pengawasan partisipasi komite Madrasah	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
1. Analisis perencanaan partisipasi komite Madrasah.....	81
2. Analisis pelaksanaan partisipasi komite Madrasah	87
3. Analisis pengawasan partisipasi komite Madrasah	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)
Lampiran 3	Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing
Lampiran 4	Rekomendasi dari Kementerian Agama Kab. Kotim
Lampiran 5	Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan.....	48
-----------	--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1 Kerangka Pikir.....	53
	4.1 Struktur Organisasi MI Kurnia Hasan.....	69
	4.2 Struktur Pengurus Komite	70



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)
- Lampiran 3 Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing
- Lampiran 4 Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kotim
- Lampiran 5 Riwayat Hidup Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai sasaran pembangunan di bidang pendidikan dapat ditingkatkan dan terpenuhi dengan adanya suatu wadah untuk bekerjasama menyalurkan aspirasi dan menggali potensi masyarakat yaitu melalui komite madrasah. Dengan begitu lembaga pendidikan dapat memberikan harapan kepada masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

Komite madrasah merupakan mitra madrasah yang dibentuk berdasarkan hubungan masyarakat, orang tua, dan madrasah yang diadakan melalui rapat baik secara musyawarah maupun mufakat. Selain itu, tujuan dari pembentukan komite madrasah yaitu meningkatkan program madrasah dan menjalin hubungan yang harmonis antar warga madrasah yang dapat membantu bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah tersebut. Selain itu komite madrasah juga mempunyai peran yaitu sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengawas, dan mediator. Berdasarkan hal tersebut, peran dan tujuan komite madrasah sangat diperlukan dalam pelaksanaan program.

Uraian di atas jelas bahwa lingkungan pendidikan bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas. Ia sebagai suatu sistem terbuka yang selalu mengadakan hubungan atau kerjasama yang baik dengan masyarakat, secara bersama sama

membangun pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi modern pada saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi modal utama dalam membangun dan memajukan bangsa termasuk masyarakat itu sendiri.¹

Penyelenggaran pendidikan memerlukan dukungan dan masyarakat yang merupakan stakeholder pendidikan, mengingat masyarakat itu sangat kompleks dan jumlahnya sangat tak terbatas sehingga madrasah mengalami kesulitan untuk berinteraksi. Konsep masyarakat perlu disederhanakan agar madrasah menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan system perwakilan dengan membentuk suatu wadah/organisasi komite madrasah di tingkat suatu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah diperlukan adanya komite Madrasah atau komite madrasah.

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Dasar hukum Komite Madrasah saat ini diperbaharui dan diatur dengan Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

¹ Wahjo Sumojo, *Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 331.

Komite Madrasah ditetapkan Menteri Agama Fachrul Razi pada tanggal 26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 520, agar setiap orang mengetahuinya.²

Komite Madrasah dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah dapat menyampaikan secara tertulis atau melalui forum rapat. Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah, sebagai bentuk fungsi pemberian dukungan yang semua itu telah masuk dalam sebuah perencanaan terlebih dahulu, Hal diatas sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسًاۙ مَّا قَدَّمْتَلِغَدُوْا اٰتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ ۱۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴

Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Jadi, tidak bisa dikatakan “*saya telah menegakkan shalat*”, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan.

² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2020

³ Q.S Al-Hasyr (59): 18

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta, 2013.

Begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah taqwa (pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanNya yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan.”⁵

Sebagai seorang yang beriman tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertaqwa kepada Allah. Karena dalam rangkaian ayat ini perintah taqwa hanya diperuntukkan kepada orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertaqwa.

Potongan ayat selanjutnya inilah yang memiliki makna dan motivasi mendalam tentang intropeksi diri dan pentingnya manajemen waktu yang baik sehingga menjadi penting untuk selalu menanam kebaikan untuk dipetik kelak di hari akhir. Allah berfirman sebagai berikut:⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسًا۟ مَّا قَدَّمْتَلُوْا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...(Q.S Al-Hasyr Ayat 18)”⁷

Menurut beberapa *mufassir* kata *ghad* memiliki banyak arti Al-Qurthubi menjelaskan yang dimaksud dengan kata tersebut adalah hari kiamat. Kata-kata *ghad* sendiri dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli ta’wil

⁵ Muhammad Ali Ashobuni, Al Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 1999, h 81

⁶ Q.S Al-Hasyr Ayat 18

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, Jakarta, 2013.

menyatakan dalam beberapa riwayat: Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan besok adalah hari kiamat. Ada juga yang mengartikan ‘*ghad*’ sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan.⁸

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini disamakan dengan perkataan “*haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu*” Hisablah (introspeksi) diri kalian sebelum nanti kalian dihisab (di hari akhir). Potongan ayat tersebut kembali mengulang untuk kedua kalinya kalimat yang artinya sama bertaqwalah kepada Allah. Dalam kaidah Bahasa Arab apabila ada suatu kata yang diulang sebanyak dua kali dalam satu susunan kalimat maka kalimat tersebut mengandung unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kalimat *wattaqullah* (dalam ayat ini) memberikan pengertian: kalimat (*wattaqullah*) pertama bisa dipahami sebagai perintah untuk bertaubat terhadap apa pun perbuatan dosa yang pernah dilakukan, sedangkan pengulangan kalimat *wattaqullah* pada ayat ini (untuk yang kedua kalinya) memberikan pengertian agar berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan maksiat yang bisa terjadi di kemudian hari setelah bertaubat, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia.⁹

⁸ Muhammad Ali Ashobuni, Al Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 1999, h 81

⁹ *Ibid*, h. 82

InnaLaaha khabiirun bima ta'maluun Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik dan buruknya pekerjaan tidak lepas dari pengawasan Sang Khaliq. Rangkaian ayat ini menjelaskan betapa pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Allah senantiasa memberi motivasi kepada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal shaleh. Dengan waktu yang diberikan pada saat ini sudah seharusnya manusia selalu berfikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal baik. Perlu diingat penciptaan manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah.

Dalam rumus kehidupan selalu dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi 3, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam ayat tersebut Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menghitung (intropeksi) perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa depan (akhirat). Sedangkan saat ini adalah waktu yang hanya di berikan untuk memanfaatkan dan mengatur waktu sebaik-baiknya adalah hal paling utama untuk mencapai kesuksesan yang akan diraih. Dan hal ini berlaku pula pada diri kita di kehidupan dunia ini. Seandainya seseorang berkeinginan menjadi seorang alim, maka tergantung bagaimana jerih payah dan banyaknya waktu untuk belajar yang dihabiskan pada saat ini. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbang yang terbaru maka tergantung bagaimana pengalaman dari pelajaran-pelajaran dari pesawat yang telah diterbangkn pada masa lalu. Seorang pemuda yang ingin sukses dalam berbisnis maka saat ini adalah waktu yang terbaik untuk merasakan kerasnya dunia bisnis dan dengan sendirinya waktu yang akan

menjawab segala bentuk jerih payah yang telah dikeluarkan untuk mencapai kesuksesannya.¹⁰

Tentu yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah timbulnya kebaikan yang mengarah kepada kesuksesan Akhirat yang abadi. Hari kiamat dikatakan seperti hari esok dan sangat dekat, tentu ibadah dan seluruh pekerjaan yang kita laksanakan pada hari ini haruslah dengan kualitas dan niat terbaik. Dan Allah menutup firmanNya dengan mengatakan bahwa Dia maha mengetahui apapun usaha yang dilakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang sukses di dunia maupun akhirat.

Selain melakukan perencanaan, hal yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan Madrasah, Komite Madrasah dapat menindaklanjuti sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau pemangku kepentingan yang lain, pengawasan dalam hal ini juga diterangkan dalam Al-Qur'an¹¹

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit merupakan sebuah Madrasah Swasta milik Yayasan yang berakreditasi "B". Kondisi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit saat ini tergolong baik secara umum akan tetapi khususnya dalam Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit terdapat beberapa masalah yang terlihat berdasarkan pada wawancara dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, dengan mengangkat beberapa hal diantaranya, Identifikasi masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Madrasah.

¹⁰ *Ibid*, h. 83

¹¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 89.

2. Masyarakat masih dinilai kurang membantu dalam proses pendidikan.
3. Bantuan yang diberikan hanya terbatas pada hal pembiayaan pendidikan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam Madrasah.
5. Sebagian orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.¹²

Sebagaimana telah di uraikan tentang permasalahan hubungan masyarakat di madrasah tersebut. Mengingat begitu pentingnya peranan masyarakat dalam lembaga pendidikan yang seharusnya memiliki kemampuan memaksimalkan hubungan dengan masyarakat, akan tetapi melihat kenyataan yang ada masih terdapat hal yang kurang maksimal, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit?
2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit?
3. Bagaimana pengawasan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit?

¹²Wawancara dengan Kepala Madrasah di Sampit, 03 Oktober 2020

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengawasan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis bermanfaat:
 - a. Memberikan pengetahuan tentang optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu Pendidikan.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:

- a. Bagi penulis dapat menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang sudah pernah dipelajari dan dapat memberikan motivasi, bahan pembelajaran dan penelitian selanjutnya agar kedepannya dapat berusaha memperoleh hasil yang lebih baik lagi.
- b. Bagi pengurus Komite Madrasah yang mengalami kendala atau hambatan terhadap profil dan peran komite, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk acuan dalam memberdayakan diri dengan lebih baik dan bekerjasama dengan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Bagi Kepala Madrasah selaku penyelenggara pendidikan, memberikan sumbangan pemikiran atau masukan akan pentingnya membina hubungan kerjasama yang baik dengan Komite Madrasah atas berlangsungnya pendidikan di satuan pendidikannya, dan bagaimana menggali potensi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Bagi masyarakat umumnya, dapat memberikan informasi tentang pentingnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peran dan Fungsi Komite

a. Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra Madrasah, jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.

Komite Madrasah dapat juga diartikan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.¹³

Komite Madrasah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa.

¹³Misbah, “Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Insania*, Vol.14 No.1 Jan-April, 2009, hlm. 3.

Anggota komite Madrasah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, jumlah dari anggota komite Madrasah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. Adapun syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite Madrasah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sebelum terbentuknya komite Madrasah, lebih dahulu kita mengenal istilah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) pada tiap-tiap Madrasah dan juga POMG (Persatuan Orang tua Murid dan Guru).¹⁴

b. Kedudukan Komite Madrasah

Komite Madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan Madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta. Komite Madrasah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain. Posisi komite Madrasah berada ditengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak Madrasah

¹⁴Ahmad Baedowi dkk, *Manajemen Madrasah Efektif* (Jakarta: Alvabet, 2015), hlm. 291.

sebagai institusi, kepala Madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite Madrasah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.¹⁵

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite Madrasah dapat dibentuk melalui alternatif sebagai berikut:

- 1) Komite madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
- 2) Terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite Madrasah.¹⁶

c. Struktur Organisasi Komite Madrasah

Pembentukan komite Madrasah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite Madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara

¹⁵Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet.II, 2007), hlm. 250.

¹⁶*Ibid*, h. 50

akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.¹⁷

Struktur kepengurusan komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada.¹⁸

d. Tujuan Komite Madrasah

Tujuan dibentuknya komite Madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat Madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah.¹⁹

Adapun tujuan dibentuknya komite Madrasah tentang Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah. Dengan demikian tujuan dibentuknya komite Madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam operasional manajemen Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Madrasah secara proposional, sehingga komite Madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Disamping hal itu, komite Madrasah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.²⁰

e. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Akan tetapi ungkapan arif tersebut sampai

¹⁷ *Ibid*, h.51

¹⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 99.

¹⁹ *Ibid*, h. 99

²⁰ Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2020

saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama pada peran serta masyarakat yang sampai saat ini belum banyak diberdayakan.

Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.²¹

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut.²²

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- 3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan

²¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54

²²Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 91

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite Madrasah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan keputusan Permenag No. 16 tahun 2020, keberadaan komite Madrasah berperan sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.²³

Keempat peran komite tersebut, bukanlah peran yang dapat berdiri sendiri, melainkan dari keempat peran tersebut saling terkait. antara peran satu dengan yang lainnya.²⁴ Dalam hal ini komite Madrasah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite Madrasah ditinjau dari segi fisik pendidikan, adapun penjabarannya secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - a) Kebijakan pendidikan
 - b) Program pendidikan
 - c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

²³Ahmad Baedowi dkk, *Manajemen Sekolah Efektif*, hlm. 290.

²⁴Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, hlm. 81.

- d) Kriteria fasilitas pendidikan²⁵
- 2) Sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
 - a) Memantau kondisi sarana dan prasarana.
 - b) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan
 - c) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu.
 - d) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.²⁶
- 3) Sebagai pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:
 - a) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah.
 - b) Kontrol terhadap perencanaan sekolah.
 - c) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.
- 4) Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
 - a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat.
 - b) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - c) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.²⁷

Apabila komite Madrasah dalam setiap satuan pendidikan sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut dengan baik, diasumsikan bahwa komite Madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja dalam sistem pendidikan tersebut.²⁸ Dengan kata lain, keberadaan dan peran dari komite sekolah perlu juga menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sementara itu untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:²⁹

²⁵Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 93.

²⁶Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 94.

²⁷Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, hlm. 251.

²⁸Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 99.

²⁹Naziardi dan Nilawati, "Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan", *Lentera*, Vol.5 No.14 2014, 71-72. (70-76)

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d) Kriteria tenaga pendidikan
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan
 - f) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.³⁰

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita paparkan peran dan fungsi komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.

³⁰Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007, hlm. 252.

- 2) Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- 3) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah.
- 4) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana strategi pengembangan sekolah/madrasah.
- 5) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah/madrasah termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M.
- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah/madrasah.
- 7) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).
- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- 9) Mengelola peran masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan sekolah/madrasah.
- 10) Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- 11) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).
- 12) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
- 13) Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara proporsional.
- 14) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar (sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.
- 15) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.
- 16) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.³¹

³¹Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011, hlm. 189.

Selain peran yang disebutkan diatas, peran nyata yang dilaksanakan komite Madrasah adalah sebagai mitra atau partner bagi pemerintah daerah maupun sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan Madrasah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite Madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di Madrasah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di Madrasah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

2. Konsep Dasar Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi/pelibatan berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Made Pidarta, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.³² Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu:³³

- 1) Adanya kemauan
- 2) Adanya kemampuan, dan
- 3) Adanya kesempatan untuk berpartisipasi

Menurut Suryosubroto partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta pendapat di atas dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang

³² Made Pidarta., *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988, hlm. 58.

³³ Slamet, Margono. *Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tenggul Landas*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1992, hlm. 135.

mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut.³⁴

Partisipasi juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks demokrasi otonomi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu:³⁵

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

Suryosubroto, *Manajemen Hubungan Madrasah dengan Masyarakat*, Yogyakarta: FIP UNY, 2006, hlm. 71.

³⁵Britha, Mikkelsen. *Metode Partisipatoris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm.120.

kebudayaan yang mereka anggap sama³⁶. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan social.³⁷

Arti masyarakat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dinyatakan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial³⁸.

Masyarakat sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan ciri-ciri kolektif, Getzels, membagikannya dalam berbagai taksonomi (kelompok), yang meliputi masyarakat setempat (local community), masyarakat administratif sosial (social community), masyarakat instrumental (instrumental community), masyarakat etnis, kasta, atau golongan (etnis, caste, or class community), dan masyarakat ideologi (ideological community).³⁹

Menurut Talcott Parson, individu dalam masyarakat menyanggah dua status, yaitu ascribed status dan achieved status. Ascribed status merupakan status yang disandang individu secara otomatis, status ini

³⁶Tim Penyusun KBBI..*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

³⁷Rodliyah. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Madrasah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm.84.

³⁸Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

³⁹ Fred C. Lunenburg & Allan C. Ornstein. *Educational Administration Concepts and Practices*.(USA: Wadsworth Cengage Learning, 2011), hlm. 51-52.

diperoleh dari keturunan atau silsilah keluarga, ras dan biologis. *Achieved* status merupakan status yang diperoleh individu melalui kerja keras atau perjuangan. Status ini akan diperoleh individu sesuai prestasinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat, individu tidak lagi menyangandng peran dari *ascribed status*-nya⁴⁰. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan normanorma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56 yaitu:

- 1) Pasal 54, meliputi: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- 2) Pasal 56, meliputi: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Madrasah/madrasah; (2) Komite Madrasah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan

⁴⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.21.

dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan⁴¹.

- 3) Bagi Madrasah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatanb. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- 2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.⁴²

⁴¹Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56

⁴²Slamet, Margono.. *Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggi Landas*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1992. hlm. 46.

Pendapat lain disampaikan Subandiyah dalam Sugiyah yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan programlain.
- c) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Irene, membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaatkeempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai

baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.⁴³

3) Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D, terbagi atas:

a) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b) Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan tidak hanya oleh pihak Madrasah, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberadaan

⁴³ Siti Irene A.D., *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 61.

masyarakat dan orangtua peserta didik ikut mewujudkan pencapaian pendidikan yang lebih baik. Pernyataan ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Zaini, Zakso, & Syukri, bahwa salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk memperoleh tujuan penyelenggaraan pendidikan yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dan orangtua peserta didik. Hal ini diterapkan untuk memperoleh dukungan dan memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk ikut berperan serta merasakan perkembangan pendidikan di daerahnya. Upaya pengadaan peran serta masyarakat atau orangtua peserta didik seperti yang dipaparkan oleh teori di atas merupakan bagian dari proses desentralisasi pendidikan.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama partisipasi masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite Madrasah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis madrasah atau masyarakat dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Madrasah ditingkat madrasah.

Komite Madrasah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara Madrasah dengan masyarakat Komite Madrasah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan Madrasah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas artinya dalam pengelolaan Madrasah dewan pendidikan khususnya kepala Madrasah bekerja sama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat madrasah untuk mengemban amanat tersebut, wadah tersebut adalah Komite Madrasah.

Bentuk manajemen dikembangkan untuk mengawal program yang diluncurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bertujuan untuk mengembalikan fungsi Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, dimana keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak adalah sebuah keniscayaan. Kawalan dimaksud adalah dalam bentuk pencarian model implementasi kemitraan yang dapat dilaksanakan dalam konteks lokal daerah masing-masing.

Pola implementasi ini kemudian diharapkan menjadi referensi pelengkap, penambah, dan/atau pengganti dari pola sebelumnya. Model ini berorientasi selain pada prosedur penyelenggaraan pelibatan orangtua pada satuan pendidikan, juga berfokus pada metode yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi orangtua.⁴⁴

- 1) Partisipasi dalam pengertian ini adalah Kemitraan, yakni kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik.
- 2) Orangtua yang dimaksud dalam kajian ini adalah Keluarga, adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat hubungan darah dan pernikahan, berkumpul dan tinggal di satu tempat/atap dalam keadaan saling ketergantungan dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak-anak mereka. Orangtua adalah ayah dan ibu, ayah atau ibu untuk orang tua tunggal, wali murid, atau pengasuh yang diberi otoritas oleh keluarga sah dari peserta didik.
- 3) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

⁴⁴ *Ibid*, h. 62

- 4) Satuan Pendidikan dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang dan jenis pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- 5) Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem di mana sebagian besar interaksi terjadi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan merupakan pemangku kepentingan Madrasah.
- 6) Komite Madrasah adalah organisasi mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 7) Ekosistem Pendidikan adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh dari semua unsur pendidikan sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh-kembang anak secara optimal.
- 8) Karakter adalah akhlak/adab, budi perkerti yang mengacu pada nilai-nilai dan norma agama, hukum, dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Madrasah, keluarga, dan masyarakat yang mencakup karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
- 9) Budaya Prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga

Madrasah yang terkait dengan pencapaian prestasi Madrasah sebagai institusi maupun prestasi individu peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi masing-masing.

Salah satu kebijakan Nasional di bidang pendidikan yang sangat populer dewasa ini adalah penerapan model manajemen berbasis Madrasah (MBS). Penerapan model MBS ini dilandasi beberapa asumsi antara lain:

- 1) Sistem sentralisasi pendidikan yang diterapkan selama ini belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan,
- 2) Kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada input dan output, padahal Madrasah sebagai sistem hendaknya melihat dari sisi input, proses, dan output,
- 3) Model mbs dianggap tepat dan sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang tengah diterapkan saat ini, dan
- 4) Lebih memberikan kesempatan dan kebebasan pada Madrasah dan stakeholders dalam mengembangkan Madrasah sesuai kondisi dan potensi daerah masing-masing.

Hadiyanto menyatakan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan model MBS pada tiap tingkat satuan pendidikan namun masih jauh dari harapan prinsip awal uji coba MBS di SD yang menetapkan tiga komponen program implementasi MBS, yaitu:

- 1) Perbaiki manajemen Madrasah,
- 2) Perbaiki proses pembelajaran dengan pendekatan pakem, dan

3) Peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini disebabkan karena munculnya model mbs di indonesia tidak berasal dari inisiatif.⁴⁵

Pada era sentralisasi peran masyarakat dalam bidang pendidikan lebih banyak berperan sebagai pendukung dan pemberi dana material untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. Pada era desentralisasi pendidikan yang disebut otonomi Madrasah dengan konsep manajemen berbasis Madrasah (MBS) peran serta masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan dan masyarakat yang merupakan stakeholder pendidikan, mengingat masyarakat itu sangat kompleks dan jumlahnya sangat tak terbatas sehingga Madrasah mengalami kesulitan untuk berinteraksi. Konsep masyarakat perlu disederhanakan agar Madrasah menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan system perwakilan dengan membentuk suatu wadah/organisasi komite Madrasah di tingkat suatu pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 perlu dibentuknya komite Madrasah pada setiap satuan pendidikan adalah untuk menjembatani kepentingan Madrasah dan masyarakat serta menampung maupun menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite Madrasah adalah badan atau lembaga non-profit dan non politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh

⁴⁵Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 49

stakeholder pada jenjang satuan pendidikan, sebagai representatif dari berbagai unsure harus benar-benar mewakili masyarakat dari keberagaman dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, lahirnya komite madrasah atau dewan madrasah sebenarnya tidak terlalu asing atau hal yang sama sekali baru bagi madrasah. Hanya mungkin yang baru adalah perluasan peranan lembaga tersebut serta perluasan anggotanya. Komite/Dewan madrasah dilihat dari pengertiannya dapat dilihat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.
- 2) Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan/madrasah, seperti Komite madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Madrasah, Dewan Madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite Tk; atau nama lain yang telah disepakati. Kesepakatan ini hendaknya lahir dari hasil musyawarah anggota pada saat penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang melibatkan semua anggota. Kesepakatan nama sangat penting karena nama tersebut dapat membawa citra yang baik atau tidak baik bagi Madrasah.

⁴⁶ Zulkifli, "Komite Sekolah di Antara Cita dan Realita", Jurnal Potensia Vol. 14, Edisi 1 Januari-Juni 2015, hlm. 105

3) BP3, Komite Madrasah dan/atau majelis Madrasah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini. Perluasan fungsi peran hendaknya dibicarakan agar fungsi dan peran komite Madrasah ini tidak tumpang tindih dengan peran Madrasah atau dapat mengacaukan mana fungsi dan peran yang harus dilakukan Madrasah mana yang menjadi fungsi dan peran komite. Komite Madrasah dibentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai masyarakat setempat, oleh karena itu komite Madrasah adalah badan yang bersifat otonom dan mandiri yang menganut kebersamaan yang menuju peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁴⁷ Keberadaan komite Madrasah ini adalah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan. Dari pengertian dan nama badan seperti disebutkan di atas, nampak bahwa badan ini hanya merupakan perluasan dari BP3 yang sudah ada sejak lama di masing-masing madrasah. Karena cikal bakalnya sudah ada, maka bagi kepala Madrasah bukan hal yang sulit untuk bekerjasama dengan komite ini.

⁴⁷Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

3. Manajemen Partisipasi Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan Mediator (mediator agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pelaksanaan program kerja, dan pengawasan/pengontrol program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

a. Perencanaan Partisipasi Komite Madrasah

Dalam perencanaan partisipasi Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah.

Perencanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

- 1) Pemberian pertimbangan dalam:
 - a) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah, Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah

perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

- b) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah,
- c) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah, dan
- d) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah.⁴⁸

b. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Maka dari itu untuk meningkatkan profesionalitas atau kompetensi guru harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan guru.⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2020

⁴⁹ Subyantoro, *Pelaksanaan Pendidikan Agama*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, hlm. 127.

Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan. Kontribusi komite Madrasah terhadap Madrasah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite Madrasah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan Madrasah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas Madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan dan membahas laporan tahunan Madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite Madrasah.⁵⁰

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam hal pelaksanaan komite Madrasah telah menerima masukan terkait bimbingan extra kurikuler mengaji dimana hal ini didukung penuh oleh wali murid dikarenakan perlunya bimbingan ekstra mengaji tersebut bagi siswa/siswi di Madrasah.⁵¹

Komite Madrasah diharapkan sebagai acuan pelaksanaan bagi semua elemen masyarakat yang akan membentuk Dewan Pendidikan

⁵⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 101

⁵¹ *Ibid*, h. 101

dan Komite Madrasah. Pembentukan Komite Madrasah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsepsi partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis Madrasah yang kini telah dilaksanakan di Indonesia. Komite Madrasah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan peran dalam pendidikan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelengkap organisasi, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan madrasah. Dalam menentukan kebijakan, madrasah tidak bisa berdiri sendiri terutama dalam membuat anggaran pendidikan, tetapi harus bekerjasama dengan komite madrasah.⁵²

Dalam pelaksanaannya, komite harus berpartisipasi dalam hal: *“pertama, pelaksanaan pemberian dukungan financial dan pemikiran. kedua, melaksanakan pengembangan kerjasama Madrasah.”*⁵³

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.⁵⁴

Peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memang perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala Madrasah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan

⁵² Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 84

⁵³ Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2020

⁵⁴ Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 85

institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.⁵⁵

c. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah

Pengawasan (controlling) terhadap penyelenggaraan madrasah merupakan tugas dan peran yang mendasar bagi lembaga mitra madrasah seperti komite madrasah. Komite madrasah seyogyanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran di madrasah untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan dengan tepat.⁵⁶

Pengawasan yang harus dilakukan komite madrasah menurut Permenag No. 16 Tahun 2020 yaitu: *“Pertama, pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kedua, Pengawasan terhadap penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.”*⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Guna memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk kajian pustaka penelitian yang relevan dengan

⁵⁵ *Ibid*, h. 85

⁵⁶ *Ibid*, h. 86

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2020

judul “Strategi Komite Madrasah Dalam Membantu Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Al Khozini Ganjaran Gondanglegi Malang.” Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hasil studi terdahulu yang dapat diasumsikan memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya, yaitu:

Penelitian Jasmani, yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Memberdayakan Komite Madrasah di MIN Pahandut dan MIN Langkai Palangka Raya.” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran komite madrasah, model kepemimpinan kepala madrasah dalam memberdayakan peran komite madrasah dan hasil pemberdayaan peran komite madrasah pada MIN Pahandut dan MIN Langkai Palangka Raya Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya studi kasus dengan rancangan multi situs. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu bahwa komite madrasah telah menjalankan perannya sebagai advisory agency, supporting agency dan mediator agency karena diberdayakan kepala madrasah, sisi lain memang komite Madrasah belum menjalankan perannya sebagai controlling agency. Sedangkan model kepemimpinan dalam memberdayakan komite Madrasah mengarah kepada model kepemimpinan transformasional yang diisyaratkan Gary Yukl, James Mc Gregor Burns dan Bernad Bass. Sementara hasil yang dari pemberdayaan komite Madrasah adalah beralih status yang awalnya madrasah regular, berubah menjadi madrasah model, dan madrasah model, berubah menjadi madrasah unggulan.⁵⁸

⁵⁸ Jasmani. *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Memberdayakan Komite Madrasah*. Disertasi, Malang: UIN Maliki Malang, 2014, h.45

Tesis ini ada kesamaan dengan disertasi yang telah di teliti oleh Jasmani yaitu sama-sama membahas mengenai keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan, sedangkan perbedaannya yaitu fokus pada penelitian Jasmani lebih kepada model kepemimpinan kepala Madrasah dalam memberdayakan komite Madrasah, peran komite Madrasah dan hasil dari peran komite Madrasah tersebut. Sedangkan pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan komite madrasah.

Penelitian Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul “Peran Komite Madrasah Dalam Membangun Kewirausahaan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan. Mendeskripsikan peran komite Madrasah di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan. Mendeskripsikan usaha-usaha komite Madrasah di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan. Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik untuk keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu temuan pertama, komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan sehingga tumbuh jiwa kewirausahaan pada kepala Madrasah, tenaga pendidik dan orang tua siswa. Kedua, kinerja komite Madrasah belum maksimal dalam kinerja. Ketiga, usaha-usaha komite Madrasah dalam membangun kewirausahaan melibatkan kepala Madrasah, tenaga pendidik,

orang tua siswa, dan masyarakat agar mengetahui potensi mereka, mendirikan paguyuban walimurid, menambah unit usaha, mengadakan kerja sama dengan pihak swasta seperti Maubel Alam jaya Tuban.⁵⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada kinerja komite Madrasah, dimana peneliti akan melakukan penelitian tentang partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan .pelaksanaan serta pengawasan komite madrasah. Bukan peran komite Madrasah dalam membangun kewirausahaan.Jurnal yang ditulis oleh Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh bertujuan untuk peran komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh komite Madrasah dalam membangun kewirausahaan.

Penelitian Said Wachin, yang dilakukan pada tahun 2007 dengan judul “Kontribusi Komite Madrasah Terhadap Proses Manajemen Sarana Dan Prasarana Madrasah di Madrasah Dasar Islam Al-Munawarah Pamekasan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kontribusi komite Madrasah terhadap proses manajemen sarana prasarana Madrasah yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengamanan sarana prasarana Madrasah, dan alasan dilakukan proses manajemen sarana dan

⁵⁹ Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh, *Peran Komite Madrasah Dalam Membangun Kewirausahaan (Studi Kasus di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan)*, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan.Vol. 3 No. 3.Januari 2014.hlm. 100-113.

prasarana. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu bahwa komite Madrasah berkontribusi: pertama, pengadaan yang meliputi; buku-buku perpustakaan, pembangunan gedung laboratorium, melengkapi mebel air, menyediakan peralatan elektronik (multi media), menyediakan sarana prasarana olahraga dan taman, pembangunan masjid, dan pembangunan ruang kelas. Kedua inventarisasi yang meliputi; inventarisasi buku-buku pelajaran, perpustakaan, perabot alat Madrasah. Ketiga pendistribusian, yang meliputi buku paket dan pelajaran, alat-alat kantor. Keempat pemeliharaan yang meliputi renovasi gedung yang rusak, pengecatan Madrasah. Kelima penghapusan yang meliputi gedung kelas, bangku dan meja siswa. Keenam pengamanan yang meliputi gedung Madrasah dan laboratorium.⁶⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Said Wachin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada kinerja komite Madrasah, Said Wachin meneliti kontribusi komite Madrasah terhadap proses manajemen sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun tesis pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite

⁶⁰ Said Wachdin. *Kontribusi Komite Madrasah Terhadap Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah di Madrasah Dasar Islam Al-Munawarah Pamekasan*. Tesis. Malang: UIN Maliki Malang. 2007, h. 56

MadrasahMadrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan.pelaksanaan serta pengawasan komite skeolah.

Penelitian Ari Khozin Effendi, yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Dasar studi pada SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung kidul Periode Tahun 2007-2014).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepala Madrasah dalam mengelola pendidikan Madrasah dasar di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul dan untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah dasar di Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul.Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis Miles & Huberman adalah verification dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) peran yang dilakukan kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi pembenahan input, proses dan output serta mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara berkesinambungan, 2) kepala SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul melakukan tiga peran penting yakni: sebagai leader, sebagai manajer, dan sebagai innovator dalam menjalankan pengelolaanya untuk meningkatkan mutu pendidikan, 3) peningkatan mutu yang dilakukan kepala SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul antara lain: a) peningkatan profesionalisme guru, b) pelayanan proses pembelajaran, c) pembenahan saran dan prasarana, d) pembenahan manajemen, e) penarapan budaya mutu. Faktor

pendukung 1) sarana pendidikan, 2) profesionalisme guru, 3) hubungan Madrasah dan masyarakat yang harmonis. Sedangkan faktor penghambat 1) lokasi Madrasah yang kurang strategis 2) kurangnya pemanfaatan internet, 3) kurangnya pemanfaatan alat peraga.⁶¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ari Khozin Effendi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang keberadaan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan perbedaannya dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite Madrasah Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan komite madrasah. Ari Khozin Effendi meneliti tentang peran kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun tesis ini meneliti strategi komite Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan.

Mengetahui peran komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana, mengetahui faktor pendukung dan apa solusi yang diberikan komite Madrasah dalam menghadapi hambatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan yaitu (1) pengadaan sarana prasarana di SD Negeri IV Pucang selalu melalui rapat dengan elemen Madrasah,

⁶¹ Ari Khozin Effendi *Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Dasar (Studi pada SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul Priode Tahun 2007-2014)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2015

(2) pentingnya komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana, (3) 47able47 pendukung sarana dan prasarana dari wali siswa mempermudah komite Madrasah dalam memenuhi kebutuhan Madrasah, (4) 47able47 penghambat ketika dari berbagai pihak ada tentangan maka komite Madrasah berperan untuk menjelaskan kepada wali murid atau elemen Madrasah, dan (5) solusi komite Madrasah dalam menghadapi hambatan pengadaan sarana dan prasarana.⁶²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Selvi Mayaranidan Desi Nurhikmahyanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Selvi Mayarani dan Desi Nurhikmah yanti lebih terhadap peran komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari upaya komite Madrasah, 47able47 pendukung dan solusi komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan pelaksanaan serta pengawasan komite madrasah.

Dengan demikian, penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, khususnya tentang strategi komite Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang komite Madrasah sebagai

⁶²Selvi Mayarani dan Desi Nurhikmahyanti, *Pran Komite Madrasah Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Pucung IV Siduarjo*, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan. Vol. 4 No. 4 April 2014, hlm. 163-176.

badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, pengadaan sarana dan prasara, penyelenggaraan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih berputar pada pemberdayaan komite Madrasah oleh kepala Madrasah, kontribusi komite Madrasah dalam pengadaan sarana prasarana, peran komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan dan peran komite Madrasah dalam membangun kewirausahaan dalam lembaga pendidikan.

Agar lebih mudah untuk memahami perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya dan terjaga orisinalitasnya serta terhindar dari penduplikasian, maka untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Temuan Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Jasmani, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam memberdayakan Komite Madrasah. (2014)	Sama-sama meneliti keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan, madrasah maupun Madrasah.	Fokus pada penelitian Jasmani lebih kepada model kepemimpinan kepala Madrasah dalam memberdayakan komite Madrasah, peran komite Madrasah dan hasil dari peran komite Madrasah tersebut. Sedangkan dalam tesis ini fokus	Komite madrasah telah menjalankan perannya sebagai <i>advisory agency</i> , <i>supporting agency</i> , dan <i>mediator agency</i> karena diberdayakan kepala madrasah. Dari pemberdayaan komite Madrasah adalah beralih status yang awalnya madrasah regular, berubah menjadi

			penelitiannya pada partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan	madrasah model, dan madrasah model, berubah menjadi madrasah unggulan
2.	Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Shole, Peran Komite Madrasah Dalam Membangun Kewirausahaan. (2014)	Sama-sama meneliti keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan, madrasah maupun Madrasah.	Fokus penelitian pada partisipasi komite Madrasah, dimana peneliti akan melakukan penelitian tentang partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Bukan peran komite Madrasah dalam membangun Kewirausahaan seperti jurnal yang ditulis oleh Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh yang bertujuan untuk peran komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan dan usaha yang dilakukan oleh komite	Pertama, komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan sehingga tumbuh jiwa kewirausahaan pada kepala Madrasah, tenaga pendidik dan orang tua siswa. Kedua, kinerja komite Madrasah belum maksimal dalam kinerja. Ketiga, usaha-usaha komite Madrasah dalam membangun kewirausahaan melibatkan kepala Madrasah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat agar masyarakat mengetahui potensi mereka, mendirikan Paguyuban walimurid, menambatkan unit usaha, mengadakan kerjasama dengan pihak swasta seperti Maubel Alam jaya Tuban

			Madrasah dalam membangun kewirausahaan .	
3.	Said Wachin, Kontribusi Komite Madrasah terhadap proses manajemen sarana dan prasarana Madrasah (2007)	Sama-sama meneliti keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan, madrasah maupun Madrasah	Said Wachin meneliti kontribusi komite Madrasah terhadap proses manajemen sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun tesis ini meneliti partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan Pendidikan	Kontribusi komite Madrasah sebagai (a) pengadaan, (b) inventarisasi, (c) pendistribusian, (d) pemeliharaan, (e) penghapusan, dan (f) pengamanan.
4.	Ari Khozin Effendi, Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Dasar studi pada SD Muhammadiyah Al-	Sama-sama meneliti peningkatan mutu pendidikan, madrasah maupun Madrasah.	Ari Khozin Effendi meneliti tentang peran kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, faktor pendukung dan penghambat	1) pembenahan input, proses dan output 2) kepala sekolah melakukan tiga peran penting yakni: sebagai leader, sebagai manajer, dan sebagai inovator.

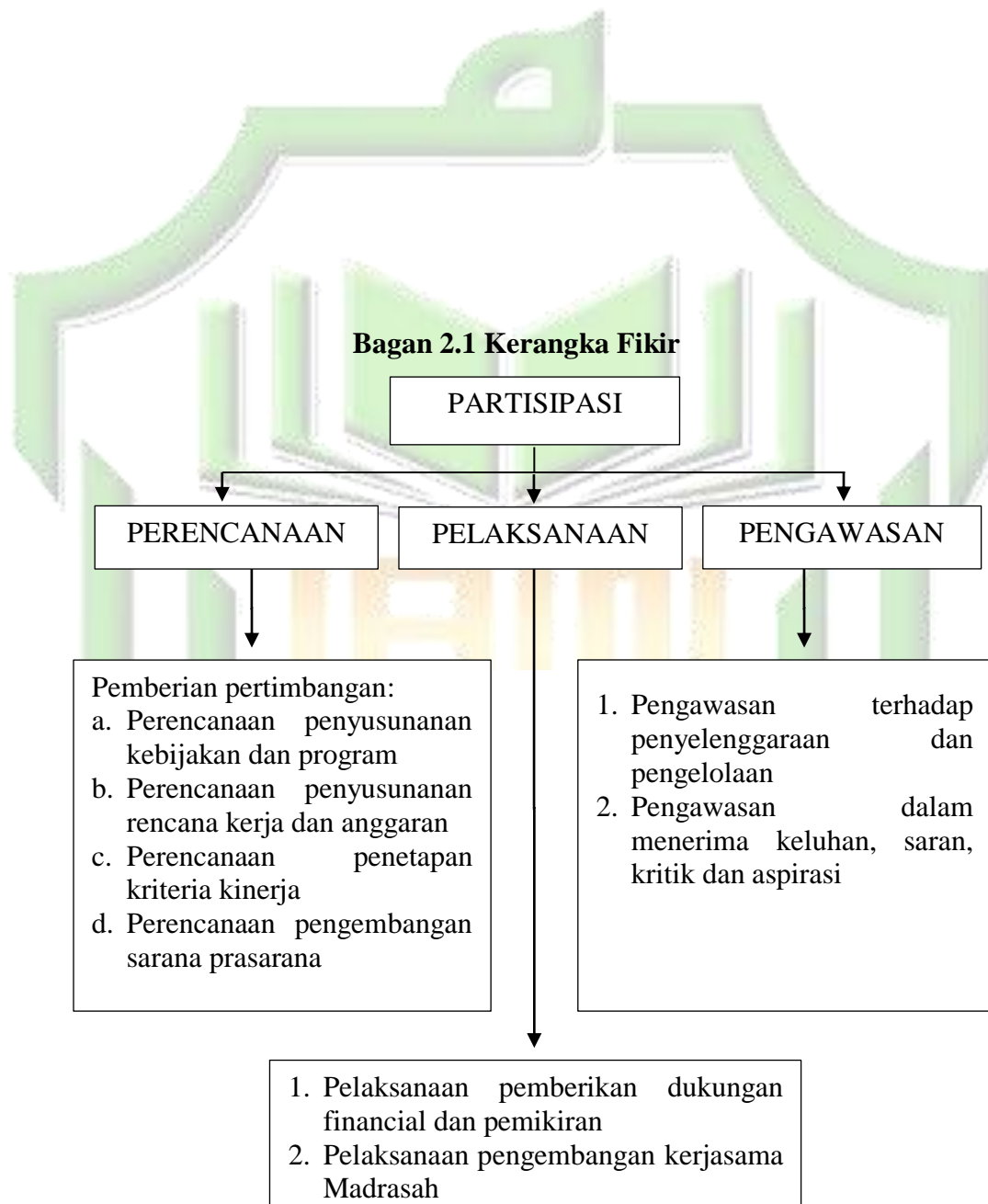
	Mujahidin Wonosari Gunungkidul Periode Tahun 2007-2014) (2015)		dalam meningkatkan mutu pendidikan Adapun tesis ini meneliti partisipasi komite Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Bukan peran kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.	3) peningkatan mutu, mutu guru, mutu pelayanan, dan mutu pembenahan sarana dan prasarana.
5	Selvi Mayarani dan Desi Nurhikmahyanti, Peran Komite Madrasah Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo. (2014)	Sama-sama meneliti keberadaan komite Madrasah dalam membina pendidikan, madrasah maupun Madrasah	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Selvi Mayarani 09010714002 dan Desi Nurhikmahyanti lebih terhadap peran komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari upaya komite Madrasah, faktor pendukung dan solusi komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Ada	Peneliti menghasilkan sebuah temuan bahwa komite Madrasah melakukan pengadaan sarana prasarana, faktor pendukung sarana dan prasarana, dan faktor penghambat dari pihak wali murid maka komite Madrasah berperan untuk memberikan pemahaman, dan solusi komite Madrasah dalam menghadapi hambatan pengadaan sarana dan prasarana

			<p>pun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada strategi komite Madrasah Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai pada evaluasinya.</p>	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini diawali dengan sebuah gagasan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah terdapat peran komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, baik berfungsi sebagai mitra, maupun sebagai bagian dari madrasah yang turut serta dalam membangun kemajuan Madrasah. Oleh karena itu komite Madrasah harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin sehingga pembelajaran yang ada pada sebuah Madrasah menjadi berkualitas, sebagaimana kerangka berpikir sebagai berikut yang lebih detail menggambarkan partisipasi komite madrasah, mulai dari perencanaan yang tentunya akan disusun oleh pihak komite bersama dengan pihak Madrasah, pelaksanaan yaitu merupakan sebuah implementasi dari apa yang sudah disepakati bersama dan yang terakhir pengawasan yaitu untuk mengontrol apakah antara perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan benar.

Untuk memperjelas uraian di atas, disajikan melalui bagan sebagai berikut:



Dari bagan diatas dapat penulis jelaskan bagaimana Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan sehingga menjadi penghubung antara Madrasah dan masyarakat dan tentunya ini sesuai dengan Ketentuan dalam Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah. Untuk itu Komite Madrasah melakukan fungsinya sebagai berikut:

1. Perencanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

a. Pemberian pertimbangan dalam:

- 1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
- 2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
- 3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah;
- 4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;

2. Pelaksanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

- a. Pelaksanaan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah;
- b. Pelaksanaan pengembangan kerja sama Madrasah

3. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; dan
- b. Pengawasan dalam penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁶³ dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁴ Penelitian ini berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang diteliti mengenai partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Peneliti harus mampu memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. Adapun pemilihan tempat penelitian ini dengan beberapa alasan, diantaranya:

⁶³Hamid Patilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 2-3.

⁶⁴Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 3.

- a. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit merupakan Madrasah Swasta milik Yayasan yang berakreditasi “B”. Yang terletak di jalan Muchran Ali Baamang Tengah Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti mempunyai harapan yang mendalam mudah-mudahan tulisan ini bisa memberi sumbangsih untuk perbaikan mutu pendidikan kearah yang lebih baik.
- b. Peneliti ingin mengetahui dan memahami Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.
- c. Pertimbangan efisiensi waktu, tenaga dan finansial dengan harapan dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian.

Waktu dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Namun jika data yang dikumpulkan telah maksimal maka penelitian bisa melanjutkan ketahap berikutnya.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan suatu proses tahapan atau langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir. Paling tidak terdapat beberapa tahapan dalam penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian kualitatif. Maksud dari prosedur ini adalah agar penelitian ini berjalan lancar dan teratur, sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian ini peneliti gunakan sebagaimana pendapat Moleong, terdiri dari tahap: pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Sebagaimana dijelaskan berikut:⁶⁵

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 99

1. Pra-lapangan
 - a. Observasi awal
 - b. Menentukan rumusan masalah
 - c. Menentukan subjek dan informan
 - d. Menentukan teknik pengumpulan data
2. Pekerjaan lapangan
 - a. Melaksanakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, jalan Muhran Ali, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
 - b. Mengidentifikasi data yang telah diperoleh
3. Analisis data

Tahap ini dilakukan mulai dari awal penelitian sampai selesai menyusun laporan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah penelitian dilanjutkan dengan analisis secara mendalam, melakukan pengecekan dan pemeriksaan tentang keabsahan data dengan fenomena, wawancara maupun dokumentasi untuk membuktikan kebenaran data yang dikumpulkan oleh peneliti.

C. Data dan Sumber Data

Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁶ Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data pekerjaan rumahimer dan sumber data sekunder.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Pekerjaan rumahosedur Penelitian Suatu pendekatan Pekerjaan Rumahaktik*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

1. Sumber data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Data pekerjaan primer biasa juga disebut data mentah karena diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.⁶⁷ Sumber data primer penelitian ini berasal pada lapangan yang diperoleh melalui wawancara yang terstruktur dan sistematis terhadap subjek dan informan yang berkompeten serta memiliki pengetahuan tentang masalah dalam hal ini kepala madrasah, tokoh masyarakat dan orang tua/wali yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi atau melalui orang yang tidak terlibat langsung pada ruang lingkup yang diteliti.⁶⁸ Maksudnya adalah penelusuran berbagai referensi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti untuk menguatkan hasil temuan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis pada penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 193.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui dan memahami keadaan objek, situasi, konteks dan maknanya untuk mengumpulkan data penelitian.⁶⁹ Dengan demikian, observasi yang telah dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung pada Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit mengenai bagaimana manajemen partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* menurut Suharsimi Arikunto adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁷⁰ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut terdiri dari dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh pewawancara (*interviewer*).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

Djam'an Satori, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.105.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 198

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁷¹

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah subjek dan informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah agar wawancara berjalan lancar, yaitu:

- a. Menentukan materi wawancara
- b. Meminta izin dengan subjek penelitian dan membuat kesepakatan untuk menentukan waktu, tempat dan alat yang digunakan dalam wawancara.
- c. Menyusun materi wawancara yang nantinya sebagai panduan agar fokus pada informasi yang dibutuhkan.

Wawancara ini digunakan untuk menanyakan informasi tentang manajemen manajemen partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit Terhadap Ketua komite, Kepala Madrasah, guru, Orang Tua/wali murid Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, penulis menanyakan hal-hal Perencanaan partisipasi

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 137.

⁷² Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.50

Komite Madrasah meliputi:

a. Pemberian pertimbangan dalam:

- 1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
- 2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
- 3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah;
- 4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;

b. Pelaksanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

- 1) Pelaksanaan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah;
- 2) Pelaksanaan pengembangan kerja sama Madrasah

c. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- 2) Pengawasan dalam menerima dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenarandata yang peneliti temukan di lapangan. Cara yang dilakukan adalah triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui data yang diperoleh tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi pada pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi lebih meningkatkan kebenaran data.⁷³

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dengan sumber data yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada lapangan melalui sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi dengan teknik yaitu dengan membandingkan hasil data observasi dengan hasil data wawancara dengan sumber yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh data akhir yang autentik sesuai dengan masalah penelitian.

F. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunandata untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan keadaan perilaku peserta didik, dan hasil implementasi nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik di

Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 241.

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Proses pengolahannya mengikuti teori Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono bahwa suatu proses pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), penarikan sebuah kesimpulan.⁷⁴

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik analisis reduksi data, penulis merangkum beberapa data yang dianggap penting untuk dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.
2. Penyajian data (*display data*), peneliti memperoleh data dan keterangan pada objek yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan kebenaran hakiki.
3. Verifikasi data/penarikan kesimpulan, setelah semua data terkumpul dan disederhanakan, diformulasikan menjadi kesimpulan.

Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Baamang. Madrasah ini bernama MI Kurnia Hasan yang beralamat di jalan Muchran Ali, kelurahan Baamang tengah II, berdiri dari tahun 1979, Madrasah MI “Kurnia Hasan saat ini telah memiliki 10 ruang kelas dan 19 orang tenaga pengajar, dengan status Madrasah yaitu swasta. Madrasah didirikan bermula sejak saudara H. Unie-H. Asan mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan Madrasah yang terletak di lingkungan RT.X Kelurahan Baamang Tengah, kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah diserahkan tanah tersebut kemudian dibentuk lah kepengurusan Yayasan pendidikan yang pertama kali pada hari selasa tanggal 1 september 1981 dimana Bapak Mangsi Tarigan, selaku wakil notaris sementara pengadilan negeri sampit dengan dasar nomor : 1/1980/UP/N/PN-SPT, dihadiri oleh saks-saksi bapak H. Uni H Asan, dan bertindak Bapak Abdul Hamid SH, Bapak Muhammad Zaini, Haji Masmito, dan Muhammad Mukri, dari kesemua tersebut bertempat tinggal di sampit.⁷⁵

⁷⁵Wawancara dengan IH, 15 April 2021.

2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan berada di Jalan Muchran Ali, kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kota Waringin Timur, Yang luasnya sebagai berikut: Panjang 33,6 m², lebar 25,5 m², luas 854,25 m², dengan batas-batas sebelah timur dengan perbatasan H. Kaderi, sebelah barat dengan Panti Asuhan Bahagia, sebelah utara dengan perbatasan Amit, sebelah selatan dengan perbatasan Hodri.⁷⁶

3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Visi adalah gambaran Madrasah yang digunakan dimasa depan secara utuh, sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi, antara visi dan misi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Adapun Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Yaitu:

Visi:

“Unggul, Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan”

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,
- b. Menanamkan nilai-nilai agama untuk menjadi insan yang taat, amanah dan berakhlak mulia,
- c. Menjadikan generasi muslim yang mampu berdaya saing tinggi, dan
- d. Meningkatkan kesadaran untuk selalu ramah lingkungan.⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan IH, 15 April 2021.

⁷⁷Observasi yang dilakukan pada saat melakukan kunjungan ke Madrasah MI Kurnia Hasan, 15 April 2021.

4. Keadaan Siswa Siswi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Siswa atau peserta didik merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi mengajar. Siswa tidak hanya dikatakan sebagai objek tetapi juga dikatakan sebagai subjek didik. Dengan demikian mengalami dinamika sebagai proses belajar mengajar. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang jumlah siswa dan siswi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa data siswa Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, Profil Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 389 peserta didik yang terdiri dari 224 siswa dan 165 siswi.⁷⁸

5. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Guru merupakan faktor terpenting dalam dunia pendidikan, karena sebagai seorang guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar saja, melainkan juga sebagai pembimbing, pendorong/motivator, serta suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Untuk itu guru perlu memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik pada saat terjun ke masyarakat. Guru atau tenaga pengajar tetap pada Yayasan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sebanyak 19 orang dengan status 10 PNS dan 9 Non PNS. Di samping tenaga pengajar, untuk memperlancar kegiatan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan juga ada Staf TU, staf tu di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan hanya berjumlah 1 orang yaitu Gito Firdaus berposisi di TU Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan.⁷⁹

⁷⁸Wawancara dengan IH, 15 April 2021.

⁷⁹Wawancara dengan IH, 15 April 2021.

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Sarana dan prasarana Madrasah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan dalam kondisi baik. Hal tersebut sangat membantu kegiatan kelancaran belajar mengajar, karena sarana dan prasarana yang diinginkan oleh semua pihak Madrasah dapat terpenuhi.

Pihak Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan juga selalu berusaha memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran karena diharapkan terpenuhinya fasilitas pendidikan merupakan penunjang terhadap keberhasilan peningkatan mutu Madrasah yang telah ditetapkan, yang hal ini lebih spesifik pada peningkatan prestasi siswa. Sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sudah cukup memenuhi dan setiap tahunnya mengalami kemajuan. Untuk mengetahui sarana fisik Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, peneliti telah melakukan penggalian data dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta didukung dengan data dokumentasi yang penulis peroleh. Adapun sarana prasarana yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan adalah ruangan Kepala Madrasah, ruangan tatausaha, ruangan khusus guru, UKS, dan 10 ruangan Kelas. Sarana

prasarana tersebut dapat menunjang baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran.⁸⁰

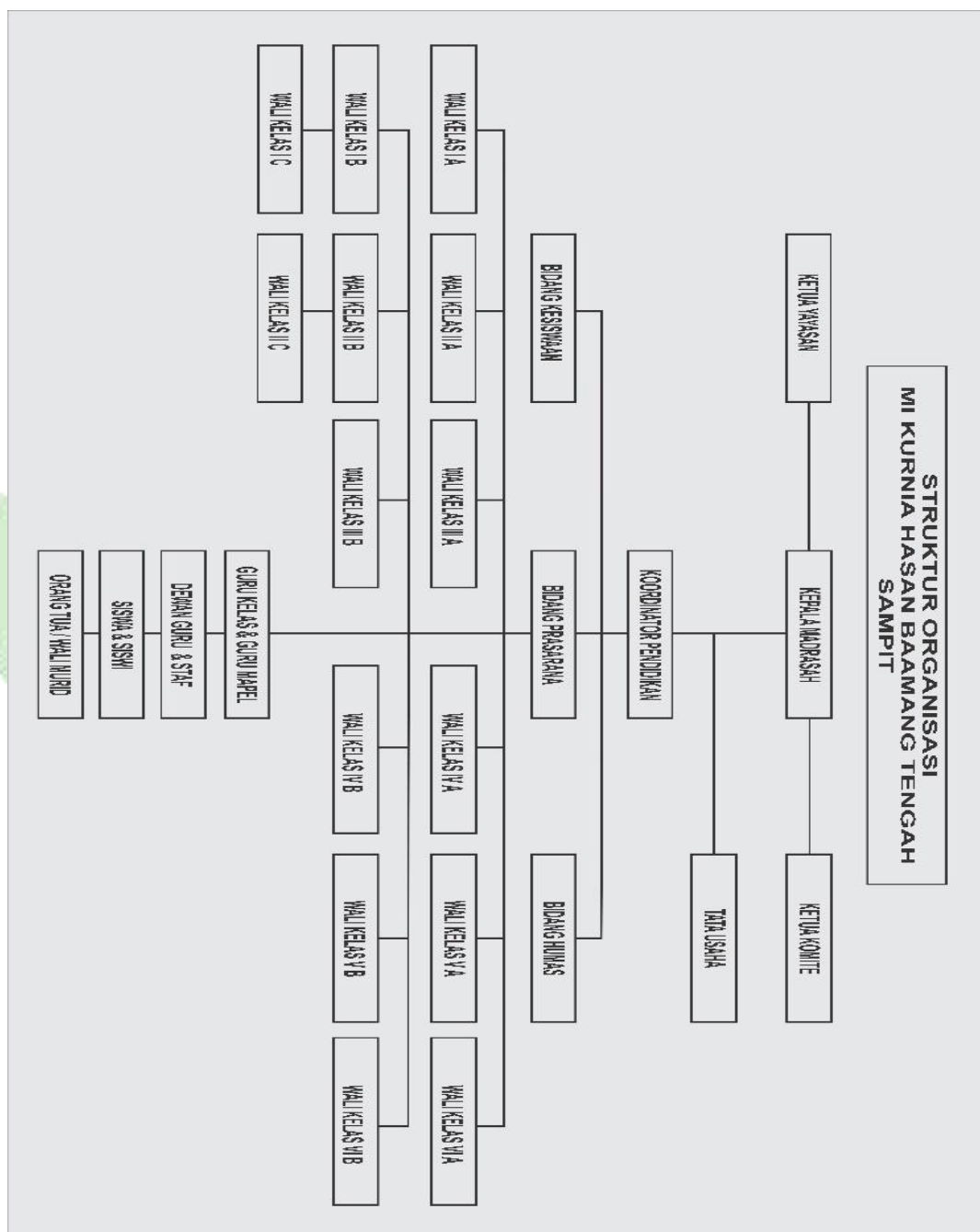
7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan

Organisasi berasal dari kata ‘organism’ yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhannya. Sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungannya.⁸¹ Dalam hal ini struktur organisasi yang ada Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit terstruktur dari ketua Yayasan, Kepala Madrasah, Ketua Komite Madrasah, Tata Usaha, Koordianator Pendidikan, Bidang Kesiswaan, Bidang Prasarana, Bidang Humas, Wali Kelas 1-6, Guru Kelas dan Guru Mapel, Dewan Guru dan Staf, Siswa dan Siswi dan Orang Tua/Wali Murid.

⁸⁰Wawancara dengan IH, 15 April 2021.

⁸¹Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 8

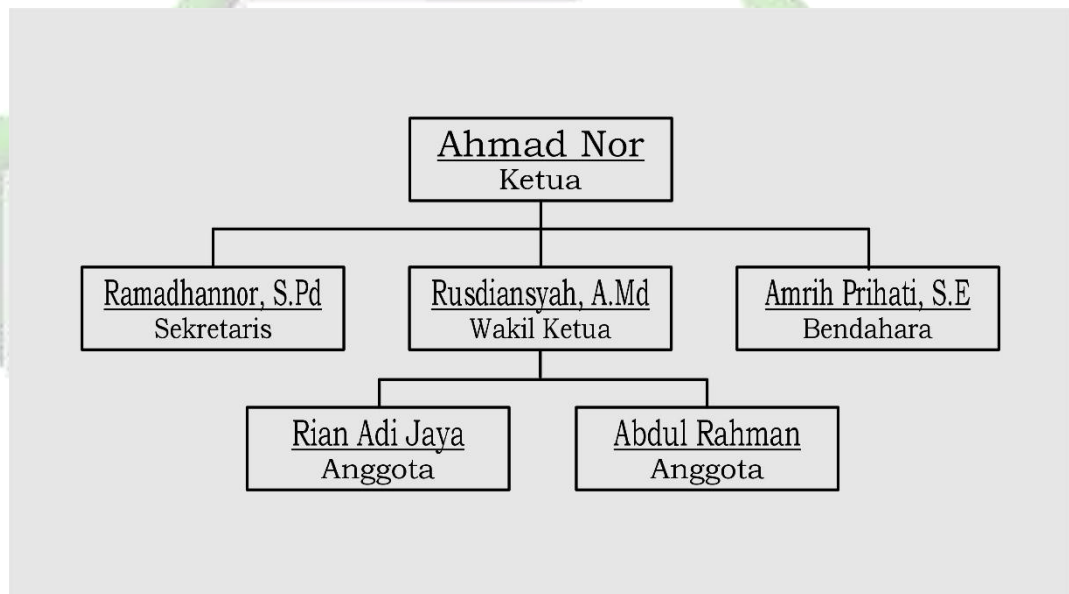




Struktur Organisasi di Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan dapat kita lihat dari struktur organisasi berikut:

8. Struktur Pengurus Komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Struktur pengurus Komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit berjumlah 6 (enam) orang dimana dalam kepengurusannya terisi satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dua anggota. Dan struktur kepengurusannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Struktur pengurus komite Madrasah dibuat sendiri setelah melakukan observasi 15 April 2021.

B. Penyajian Data

1. Perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Penulis menggunakan teori perencanaan pendidikan untuk mengetahui rencana komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit. Penulis melihat rencana komite Madrasah dalam

peningkatan penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan yaitu dengan melihat Permenag No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah.

Hasil wawancara dengan ketua komite MI Kurnia Hasan mengenai rencana komite dalam peningkatan penyelenggaraan Pendidikan. Dengan Bapak AN selaku Ketua Komite MI Kurnia Hasan. Bapak AN menjelaskan mengenai rencana komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan Pendidikan, dalam hal ini Komite Madrasah terus berusaha dalam meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit dengan selalu menjadi mitra yang baik dengan Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan.

“Dimana setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak Madrasah dalam hal ini oleh kepala Madrasah selalu berhubungan dengan pihak komite dan pihak Yayasan. Jadi dalam setiap perencanaan selalu dimusyawarahkan bersama antara tiga pihak tersebut. Seperti dalam perumusan RKAM pihak Madrasah selalu melibatkan komite Madrasah dan pihak Yayasan dalam perumusannya.”⁸²

Hal serupa yang disampaikan oleh ketua Yayasan Bapak B terkait rencana komite dalam peningkatan penyelenggaraan Pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit.

“Dalam hal ini pihak komite Madrasah selalu memberikan informasi terkait dengan apa saja yang perlu dirumuskan atau direncanakan untuk peningkatan pendidikan di Madrasah kita ini, dan mereka juga sejauh ini sangat peduli dengan peningkatan pendidikan di Madrasah. Dalam hal perencanaan pihak komite selalu menyampaikan terkait apasaja rencana mereka untuk peningkatan pendidikan di Madrasah kita ini dengan duduk bersama membahas rencana-rencana tersebut.”⁸³

⁸²Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

⁸³Wawancara dengan B di Sampit, 19 April 2021.

Pendapat yang di utarakan oleh Bapak AN mengenai apa saja rencana komite dalam meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

“Dalam hal ini komite Madrasah telah mengadakan perencanaan program perbaikan pembangunan fisik (wc), memfasilitasi siswa dan siswi dalam pengembangan minat dan bakat yaitu dengan kegiatan extra kurikuler di sore hari, pengembangan visi Madrasah dengan cara meningkatkan kualitas SDM, mempererat intraksi secara interen maupun exsteren, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada Madrasah kepada masyarakat di lingkungan Madrasah, menyusun jadwal kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan.”⁸⁴

Perencanaan yang direncanakan oleh komite Madrasah satu-persatu telah terealisasi dengan baik seperti halnya dari segi fasilitas yaitu renovasi bangunan wc Madrasah, penyusunan RKAM, penyusunan rencana anggaran biaya, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan mensosialisasikan rencana kegiatan kepala Madrasah kepada masyarakat di lingkungan Madrasah.⁸⁵ Sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu guru yang ada di Madrasah R

“terkait dengan perencanaan komite Madrasah memang sejauh ini telah banyak yang terealisasi mulai dari fasilitas sampai dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, hal ini yang kami rasakan dan kami lihat langsung sebagai guru di Madrasah”⁸⁶

Pendapat serupa yang diutarakan oleh bapak DA masyarakat yang berada di sekitar Madrasah terkait dengan sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh komite Madrasah. *“Memang pengurus komite madrasah disetiap*

⁸⁴Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

⁸⁵ Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, 18 April 2021.

⁸⁶Wawancara dengan R di Sampit, 18 April 2021.

kegiatan selalu mengundang kami dan langsung menjelaskan kalau ada kegiatan di Madrasah.”⁸⁷

Sama halnya pendapat yang di utarakan Bapak J selaku masyarakat sekitar Madrasah sekaligus orang tua dari salah satu murid di Madrasah.

iya saya kenal sama pengurus komite, mereka sering ke rumah kalau mau membuat kegiatan, bisa mengundang kami bisa juga seperti kegiatan anak-anak saja. Sejauh ini para pengurus komite perannya bagus terhadap kami.⁸⁸

Di Madrasah Ibtidayah Kurnia Hasan Sampit, komite Madrasah selalu mendukung apa saja yang menjadi program-program yang dilakukan Madrasah seperti yang di ungkapkan oleh ketua komite bapak AN sebagai berikut:

“Komite Madrasah mempunyai peran yang sangat mendukung, baik dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik Madrasah, komite Madrasah melakukan serangkaian kegiatan perencanaan, penggalangan dana, pelaksanaan menjadi program-program yang ada di Madrasah baik secara moril dan materil, dalam hal ini biasanya ada beberapa program yang didapat secara spontan oleh pihak Madrasah yang tidak tercantum dalam RKAM dan membutuhkan dana, maka komite Madrasah akan siap membantu untuk mengeluarkan dana, sesuai dengan surat permohonan yang dibuat oleh pihak Madrasah”⁸⁹

Hal serupa yang diutarakan oleh Kepala Madrasah bapak IH mengenai bantuan dana program yang lakukan oleh komite Madrasah.

“terkait beberapa program yang membutuhkan dana lebih maka biasanya pihak komite madrasah melakukan bantuan dana, tentu dalam hal ini kami pihak madrasah sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada komite madrasah. Tanpa komite madrasah rasanya tidak mungkin Madrasah ini dapat mengalami perubahan yang lebih baik, saya rasa inilah yang di sebut dengan gotong royong, saling

⁸⁷Wawancara dengan DA di Sampit, 25 April 2021.

⁸⁸Wawancara dengan J di Sampit, 28 April 2021.

⁸⁹Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

bahu-membahu membangun madrasah kepada hal yang lebih baik lagi kedepannya.”⁹⁰

Pandangan yang diutarakan oleh bapak AN selaku ketua komite terkait faktor pendukung dalam menjalankan rencana komite dalam meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan ialah sebagai berikut:

“tingkat kepedulian yang tinggi membuat dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan financial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat, dan kerja sama yang mudah. Pihak komite, Madrasah dan pihak yayasan dalam hal ini sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan dan atasan yang membuat mereka tidak segan dalam mengkeritik dan memberi masukan sehingga terciptanya Pendidikan yang bagus.”⁹¹

2. Pelaksanaan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Pandangan Bapak AN selaku Ketua komite Madrasah terkait pelaksanaan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit.

“Sebagai ketua komite Madrasah selama awal tahun pelajaran kami berperan aktif dalam menyusun rencana kerja Madrasah yang di dalamnya membahas mengenai pembiayaan maupun pengelolaan, karena ini berkaitan dengan orang tua siswa maka apa yang diharapkan dari orang tua atau wali murid saya sampaikan kepada pihak Madrasah seperti masukan mengenai kedisiplinan siswa ketika masuk Madrasah sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di Madrasah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstra mengaji alQur’an karena melihat kemampuan dari dalam diri siswa yang masuk di Madrasah ini dirasa masih perlu pembinaan yang lebih intensif agar dapat berkembang ke depannya.”⁹²

⁹⁰Wawancara dengan IH di Sampit, 17 April 2021.

⁹¹Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

⁹²Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menemukan data berdasarkan dokumentasi komite mengenai rapat pembahasan rencana kerja anggaran Madrasah yang dihadiri oleh kepala Madrasah, perwakilan dewan guru, pengurus komite dan ketua yayasan.⁹³

Hal yang diutarakan oleh Bapak KR mengenai masukan terkait kedisiplinan siswa-siswi dan kegiatan ekstra kurikuler mengaji.

“Sebagai orang tua siswa saya merasa penyusunan rencana kerja madrasah, sampai kegiatan ekstra kurikuler mengaji adalah hal yang memang patut diapresiasi dan kami mendukung penuh atas hal itu. Ditambah aspirasi kami dalam hal kedisiplinan siswa dan siswi juga sudah tersampaikan dan menjadi perhatian madrasah sehingga saya rasa ini merupakan suatu hal yang positif dalam membangun kemajuan madrasah serta kemajuan siswa dan siswi”⁹⁴

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, pelaksanaan partisipasi komite dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan dapat diwujudkan yakni diantaranya dengan pemecahan masalah biaya Madrasah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan Madrasah yang sudah rusak. Partisipasi komite tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam memberikan suatu dukungan khususnya untuk orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi guna menunjang pendidikan di Madrasah.⁹⁵ Hal yang diutarakan Bapak B selaku ketua Yayasan, Pelaksanaan partisipasi komite dalam meningkatkan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit.

⁹³ Dokumentasi pengurus komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, 20 April 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan KR di Sampit, 23 April 2021.

⁹⁵ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Grasindo, 2018, h.80

“Terkait pelaksanaan mereka komite sejauh ini selalu menyelesaikan perencanaan-perencanaan yang telah disampaikan ketika rapat, dan dengan trobosan-terobosan yang dilakukan komite Madrasah dengan menghubungkan semua pihak-pihak terkait memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelaksanaan perencanaan yang dalam hal ini meningkatkan pendidikan di Madrasah kita ini.”⁹⁶

Hal yang diutarakan oleh bapak KR terkait peran komite Madrasah sebagai penghubung antara orang tua siswa dan pihak Madrasah ialah.

“sejauh ini komite Madrasah selalu berupaya dalam menjembatani antara orang tua siswa dan pihak Madrasah. Contohnya dalam hal aspirasi yang disampaikan oleh orang tua siswa kepada pihak Madrasah, selalu kami sampaikan kepada pihak Madrasah terkait kritik dan saran tersebut. Dan kami selaku komite Madrasah juga ikut membantu dalam hal apa saja yang menjadi kami lakukan terkhusus dari segi anggaran yang diperlukan”⁹⁷

Selain itu, komite juga mendukung dan mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini komite Madrasah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak IH selaku Kepala Madrasah Madrasah Kurnia Hasan Sampit sebagai berikut:

“Komite Madrasah Kurnia Hasan sampit sangat mendukung, baik dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa terkait apa saja yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Kurnia Hasan Sampit ini, dan komite Madrasah menerapkan sistem iuran ke orang tua siswa agar terciptanya kedisiplinan dan tercapainya pendidikan yang bermutu karena didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus.”⁹⁸

Selain itu, komite Madrasah membantu dalam menunjang sarana dan prasarana Madrasah terutama untuk menunjang kelancaran proses

⁹⁶Wawancara dengan B di Sampit, 19 April 2021.

⁹⁷Wawancara dengan KR di Sampit, 23 April 2021.

⁹⁸Wawancara dengan IH di Sampit, 17 April 2021.

pembelajaran di Madrasah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak AN sebagai berikut:

“Saya selaku ketua komite Madrasah Kurnia Hasan Sampit sangat mendukung dengan adanya proses pembelajaran yang ada di Madrasah tersebut. Jadi, setelah diadakan musyawarah dengan kepala Madrasah, di sini komite Madrasah juga ikut berperan untuk menjadikan anak agar selalu menaati peraturan atau tata tertib ketika sedang berlangsung pelajaran di dalam kelas. Selain itu, komite Madrasah juga berperan dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite tidak memberatkan orang tua, di sini komite Madrasah menerapkan sistem iuran kepada orang tua siswa, yaitu dengan membayar iuran sebesar Rp. 20.000,00/bulan yang Insya Allah tidak memberatkan untuk orang tua siswa.”⁹⁹

Berdasarkan observasi peneliti melihat sarana prasarana penunjang pembelajaran berupa proyektor yang dibeli dari dana komite madrasah.¹⁰⁰

Sehubungan dengan hal ini, diungkapkan oleh bapak S selaku orang tua siswa yang peneliti wawancarai pada waktu itu yakni sebagai berikut:

“Dari pihak komite Madrasah itu sendiri sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Madrasah. Selain itu, komite Madrasah juga berfungsi sebagai penggalang dana di mana komite Madrasah meminta dana atau iuran dari orang tua siswa yang sangat terjangkau”¹⁰¹

Hal serupa yang diutarakan oleh bapak KL selaku orang tua siswa terkait peningkatan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit.

“sejauh ini yang kami lihat bagus pang, anak uln wayah ini lebih disiplin, mau belajar mengaji. Kekawanan yanglain jua pang yang membawai gara-gara disuruh guru. Ulun harap buhan guru-guru Madrasah selain maanu kedisiplinan jua maanu motifasi kekanakan biar cangkal belajar”¹⁰²

⁹⁹Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

¹⁰⁰ Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, 20 April 2021.

¹⁰¹Wawancara dengan S di Sampit, 20 April 2021.

¹⁰²Wawancara dengan KL di Sampit, 22 April 2021

Peran yayasan Kurnia Hasan Sampit agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Madrasah Kurnia Hasan Sampit. Dalam hal ini pihak Yayasan selalu membantu dan memberikan arahan terkait apa saja program-program yang akan dijalankan oleh pihak Madrasah.¹⁰³

3. Pengawasan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit

Peran komite Madrasah sebagai pengawas dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. Peran pengontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh komite Madrasah meliputi pengontrolan terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah, disamping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di Madrasah. Seperti yang disampaikan oleh bapak AN :

“Dalam hal ini pihak komite Madrasah telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah dengan cara mengikuti rapat tahunan yang di selenggarakan oleh Madrasah sehingga upaya evaluasi program kerja Madrasah oleh komite dapat tersampaikan melalui musyawarah”¹⁰⁴

Hal ini sesuai dengan dokumen komite madrasah mengenai rapat bersama komite, yayasan dan madrasah, komite Madrasah telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah dengan cara mengikuti rapat tahunan yang di selenggarakan oleh Madrasah.¹⁰⁵

Komite Madrasah juga melakukan fungsinya sebagai pengawasan terhadap keberhasilan suatu pendidikan dilembaga Madrasah yang dapat

¹⁰³Wawancara dengan Burhanudin di Sampit, 21 April 2021.

¹⁰⁴Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

¹⁰⁵ Dokumentasi komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, 20 April 2021.

dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap Madrasah dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang cukup dalam menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di lembaga Madrasah.¹⁰⁶

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak AN selaku Ketua Komite Madrasah.

“Disini peran komite Madrasah di MI Kurnia Hasan yang bertindak sebagai badan pengawas yaitu ikut dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja yang ada di Madrasah, penambahan fasilitas Madrasah dan proses belajar mengajar. Kalau masalah pengawasan, saya biasanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala Madrasah dan program kerja Madrasah serta dalam pengembangan dan penambahan fasilitas Madrasah. Misalnya pengadaan gambar-gambar atau tulisan mengenai pembelajaran yang bersifat umum yang ada di dalam kelas guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. dan selain itu saya juga mengawasi proses belajar mengajar siswa di MI Kurnia Hasan Sampit”¹⁰⁷

Peran pengawas ini dimaksudkan agar komite Madrasah sebagai tim atau mitra kerja dan dari pihak kepala Madrasah itu sendiri juga bisa memberikan pengawasan terhadap program kerja Madrasah dan penambahan fasilitas Madrasah serta mengawasi jalannya proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit.

“Komite Madrasah sejauh ini telah berperan aktif dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam hal pengawasan, karena komite Madrasah telah turut serta dalam mengawasi kebijakan dan program yang telah di rencanakan sampai dengan tahap pelaporan”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Juhji dan Febrianty, *Manajemen Humas Sekolah*, Bandung: Widina Bhakti, 2020, h 105

¹⁰⁷ Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021.

¹⁰⁸ Wawancara dengan IH di Sampit, 17 April 2021.

Ungkapan kepala Madrasah bahwa komite Madrasah dalam hal pengawasan telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan pengawasan yang sesuai yang dilakukan oleh komite Madrasah dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk siswa dan siswi di Madrasah Kurnia Hasan Sampit.

Hal serupa yang diutarakan oleh Bapak B selaku ketua yayasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

selain dari pelaksanaan komite Madrasah juga menjalankan tugasnya dengan baik yaitu sebagai pengawasan dimana setiap hal-hal yang dirasa ada yang kurang atau ada hal yang perlu dibicarakan terkait pelaksanaan selalu memberikan wadah untuk kami pihak yayasan untuk sama-sama membahas permasalahan tersebut.”¹⁰⁹

Dalam hal pengawasan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah kemudian mengevaluasi serta mencari solusi terbaik dalam sebuah permasalahan.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak AN sebagai berikut:

“Dalam hal perencanaan memang tidak selalu berjalan dengan lancar, namun disinilah peran pengawasan agar mengetahui sebab dan akibat dari sebuah permasalahan. Lalu biasanya pihak komite dan Madrasah melakukan pertemuan dalam rangka bermusyawarah membahas dan mencari jalan keluar yang terbaik, serta tidak lupa melakukan evaluasi agar kedepannya diharapkan meminimalisir kejadian yang sama terulang kembali.”¹¹⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak IH kepala Madrasah sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah kemudian mengevaluasi serta mencari solusi terbaik:

“Sebagai kepala Madrasah saya melihat langsung peran Komite Madrasah dalam hal pengawasan serta biasanya setiap ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaan pihak komite Madrasah selalu

¹⁰⁹Wawancara dengan B di Sampit, 19 April 2021.

¹¹⁰Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021

menginformasikan pihak Madrasah untuk mengadakan musyawarah bersama. Meskipun musyawarah biasanya dilaksanakan dengan santai namun tidak menghilangkan inti substansi dari pembahasan.”¹¹¹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagai badan mandiri di Madrasah yang keberadaannya bersifat independen dan selalu difokuskan untuk membantu dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan maka secara kelembagaan peran komite Madrasah di Madrasah Kurnia Hasan Sampit diharapkan agar dapat menjalankan sesuai tugas dan fungsinya. Komite Madrasah mewadahi peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu di Madrasah Kurnia Hasan sampit sehingga dari pihak Madrasah tentunya memberikan ruang agar komite dapat menjalankan tugas sebaik mungkin.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat 3 tujuan penelitian yang di kemukakan pada bab 1, diantara tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, Adapun untuk mencapai tujuan penelitian tersebut peneliti telah mendeskripsikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit merupakan sebuah Madrasah Swasta milik Yayasan yang berakreditasi “B”. Pencapaian akreditasi tidak lepas dari peran komite madrasah yaitu sebagai wakil dari

¹¹¹Wawancara dengan IH di Sampit, 17 April 2021

masyarakat dalam membantu kegiatan program pendidikan di Madrasah telah menunjukan tugasnya sebagai mitra Madrasah, terutama bagi kepala Madrasah dan guru dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

Kedudukan Komite Madrasah yaitu merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.¹¹²

Pada dasarnya posisi komite Madrasah berada ditengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak Madrasah sebagai institusi, kepala Madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite Madrasah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.¹¹³

Upaya Komite Madrasah dalam melakukan rencana program kerja merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite Madrasah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak Madrasah, pendukung baik berupa tenaga, pikiran, maupun dana serta hubungan baik sebagai mitra dengan pihak Madrasah, tentu hal ini di dapat melalui keterangan langsung dari Bapak AN yang menjelaskan pihak komite selalu menjaga hubungan baik kepada pihak

¹¹² Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet.II, 2007), h. 250.

¹¹³ *Ibid*, h. 250

Madrasah serta selalu melakukan Musyawarah entah itu berkaitan dengan perencanaan maupun sampai pengawasan. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan Madrasah sesuai dengan ketentuan dalam Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah. Untuk itu Komite Madrasah melakukan fungsinya sebagai berikut:¹¹⁴

a. Pemberian pertimbangan dalam:

- 1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
- 2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
- 3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah;
- 4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;

Perencanaan sebagai mana huruf a poin nomor 2) yaitu perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah maka dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan program Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, membuat rencana program sementara, menentukan prioritas terhadap rencana sementara, dan selanjutnya menentukan rencana. Lalu pihak Madrasah berkoordinasi dengan komite Madrasah, setelah sepakat lalu komite Madrasah mensosialisasikan kepada wali murid, tokoh masyarakat di lingkungan Madrasah. Ada dua rencana program dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah yaitu mengadakan perencanaan program perbaikan pembangunan fisik. Mensosialisasikan rencana kegiatan

¹¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2020

kepada Madrasah dan masyarakat di lingkungan Madrasah. Menyusun jadwal kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan. Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan.

d. Rencana partisipasi komite Madrasah dalam pengembangan Visi

Rencana Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit sejatinya selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi berdasarkan pengamatan langsung peneliti ke tempat penelitian. Dimana sesuai dengan Visi Madrasah Kurnia Hasan Sampit yaitu “Unggul, Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan” untuk mewujudkan sebuah Visi yang besar maka pihak komite memiliki rencana yaitu mempererat interaksi secara intern maupun ekstern, adapun kerjasama interaksi itu melibatkan seluruh komponen Madrasah seperti Kepala Madrasah, wakamad, guru-guru, kepala tata usaha beserta staf lainnya dan tidak menutup kemungkinan semua pihak yang berada di lingkungan Madrasah Kurnia Hasan Sampit.

Visi “Unggul, Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan” adalah salah satu upaya Madrasah dalam meningkatkan kualitas SDM tentu sejak awal hal ini sudah menjalin kerja sama dengan komite Madrasah. Rencana kedepan pihak Madrasah bersama Komite Madrasah akan berupaya mencari mitra ekstern dalam upaya terlaksananya program Madrasah yang membutuhkan dana.

Sejatinya tercapainya visi dan misi adalah tugas bersama, seperti yang diutarakan Bapak AN bahwa peningkatan kualitas SDM, mempererat intraksi secara interen maupun exstere, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada Madrasah kepada masyarakat di lingkungan Madrasah, menyusun jadwal kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan semua itu dilakukan secara bersama-sama demi tercapainya tercapainya visi dan misi Madrasah.¹¹⁵ Pola Impelementasi seperti ini berkaitan erat dengan tujuan dibentuknya komite Madrasah yang telah dijelaskan dalam Permenag No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah, agar menjadi lebih baik dan terus mengalami peningkatan baik dari segi akademik, sarana prasarana sampai kepada hal-hal yang non akademik.¹¹⁶

e. Rencana Komite Madrasah dalam pengembangan minat dan bakat

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit sejatinya telah mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakatnya. Tentunya hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Madrasah Kurnia Hasan Sampit yang mengutarakan bahwa dalam mengembangkan minat dan bakat pihak Madrasah telah mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan tentunya hal demikian juga hasil musyawarah dan rencana bersama komite Madrasah.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak AN di Sampit, 18 April 2021

¹¹⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 99

Kegiatan siswa dan siswi berupa ekstrakurikuler ini pun dibenarkan oleh guru di Madrasah Kurnia Hasan Sampit yaitu Bapak R, beliau juga mengutarakan bahwa biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada sore hari dengan tujuan dan harapan dapat mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi serta sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh Madrasah demi tercapainya visi Madrasah, namun untuk saat ini kegiatan terpaksa diberhentikan sementara akibat maraknya kasus penyebaran covid-19.

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan seorang siswi bernama HA yang memiliki hoby berolahraga dan biasanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bulu Tangkis pada sore hari, namun sementara ekstrakurikuler yang diikuti diliburkan akibat pandemi covid-19.

f. Rencana Kerjasama dengan lembaga pemerintah

Komite Madrasah bersama kepala Madrasah dan unsur terkait menyadari bahwa lembaga pemerintah cukup berperan dalam pengembangan Madrasah. Hal ini juga diutarakan langsung oleh kepala Madrasah bahwa sebagai kepala Madrasah beliau menyadari akan tugas dan fungsi salah satunya menjalankan kerja sama demi keberhasilan pembelajaran di Madrasah.

Kemudian pihak Komite Madrasah bapak AN mengatakan pula pihak Madrasah dalam hal ini sesuai dengan hasil musyawarah bersama komite telah mengadakan kegiatan pelatihan sebagai narasumber dari dinas pendidikan setempat, dan ada juga dari pihak lainnya.

Sehingga dalam analisis data ini pun peneliti melihat apa yang dilakukan oleh komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit telah sesuai dengan teori perencanaan sebagaimana dijelaskan yang maknanya adalah sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui hingga tercapainya tujuan.¹¹⁷

2. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan. Kontribusi komite Madrasah terhadap Madrasah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite Madrasah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan Madrasah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas Madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan dan membahas laporan tahunan Madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite Madrasah.¹¹⁸

¹¹⁷ Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 81.

¹¹⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 101

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam hal pelaksanaan komite Madrasah telah menerima masukan terkait bimbingan ekstra kurikuler mengaji dimana hal ini didukung penuh oleh wali murid dikarenakan perlunya bimbingan ekstra mengaji tersebut bagi siswa/siswi di Madrasah.¹¹⁹

Komite Madrasah diharapkan sebagai acuan pelaksanaan bagi semua elemen masyarakat yang akan membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Pembentukan Komite Madrasah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsepsi partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis Madrasah yang kini telah dilaksanakan di Indonesia. Komite Madrasah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan peran dalam pendidikan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelengkap organisasi, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan madrasah. Dalam menentukan kebijakan, madrasah tidak bisa berdiri sendiri terutama dalam membuat anggaran pendidikan, tetapi harus bekerjasama dengan komite madrasah.¹²⁰

Seperti yang diutarakan bapak AN selaku kepala komite Madrasah dalam wawancara yang sudah dijelaskan dalam penyajian data diatas bahwa

¹¹⁹ *Ibid*, h. 101

¹²⁰ Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 84

komite madrasah dalam melaksanakan partisipasinya turut aktif dalam keterlibatan penyusunan kerja madrasah, penyampaian aspirasi dari orang tua murid seperti kedisiplinan bahkan sampai meminta diadakannya kegiatan ekstra mengaji dengan harapan siswa dan siswi lebih fasih dan lancar dalam mengaji. Tentu jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa pihak komite Madrasah berupaya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai komite serta tenaga pengajar atau guru-guru juga melakukan hal yang sama yaitu professional sebagaimana teori pelaksanaan yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.¹²¹

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memang perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala Madrasah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut

¹²¹ Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 85

sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara Komite Madrasah benar-benar mempunyai kepedulian yang tinggi dan sejak awal mendukung didirikannya lembaga pendidikan madrasah. Dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan idana masyarakat.

Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala Madrasah adalah hubungan kerjasama kemitraan, artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang baik, setiapada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan musyawarah sehingga bukan hanya melahirkan kerjasama yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis pun menjadi dampak dari pola hubungan kerja tersebut.

Secara pemahaman memang pengertian tentang Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, namun dalam proses implementasinya sesuai dengan hasil wawancara ada hal yang memang dikhawatirkan yaitu bisa dikatakan komite Madrasah memiliki semangat dan jiwa loyalitas yang tinggi sehingga dikhawatirkan sedikit kemungkinan untuk bisa memberikan kritik, saran atau evaluasi terhadap kinerja kepala

¹²² *Ibid*, h. 85

Madrasah. Tentunya hal demikian membutuhkan profesionalitas yang tinggi.¹²³

3. Pengawasan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.

Komite madrasah adalah sebagai suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, badan ini bersifat mandiri dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite madrasah sebagai badan pengawas berarti ada beberapa indikator kerja yang mesti dilakukan oleh komite madrasah, sesuai dengan pengertian pengawas adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan adanya pengawasan yaitu membantu, membina pihak Madrasah agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan mencapai tujuan Madrasah.¹²⁴

a. Pengawasan Komite Madrasah terhadap fasilitas Madrasah

Dalam hal pengawasan Komite Madrasah melakukan secara rutin dan periodik, dan dalam pengawasan dilakukannya juga evaluasi. Evaluasi dilakukan secara periodik yaitu enam bulan sekali pada saat penerimaan hasil belajar siswa selama satu semester atau bisa dilihat dari hasil nilai ujian. Tujuan evaluasi untuk mengetahui apakah dengan dipenuhinya

¹²³ Juhji, *Manajemen Humas Sekolah*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020, h. 31

¹²⁴ Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 45

fasilitas sarana dan prasarana itu berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.

Pengawasan yang telah dilakukan bisa dikatakan baik dan maksimal. Hanya saja dalam aspek sarana dan prasarana kamar kecil (wc) masih ada yang tidak bisa di pakai, dikarenakan rusak. Pengawasan terhadap fasilitas ini sebenarnya dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi salah satunya seperti pengawasan sebenarnya sudah ada dalam Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah point nomor 4 yaitu tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Analisis Pengawasan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit ini peneliti menggunakan teori pengawasan yaitu Pengawasan (controlling) terhadap penyelenggaraan madrasah merupakan tugas dan peran yang mendasar bagi lembaga mitra madrasah seperti komite madrasah. Komite madrasah seyogyanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran di madrasah untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan dengan tepat.¹²⁵

¹²⁵ Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, h. 87

Kesimpulan hasil dari wawancara dan observasi peneliti memahami bahwa melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. kegiatan pengawasan yang dilakukan komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit difokuskan pada pengumpulan data tentang penyelenggaraan suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di Madrasah. Sesuai prinsip perencanaan dan pengawasan data riil kegiatan sangat penting untuk memastikan apakah program dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

b. Pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah

Pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah seperti dalam penambahan fasilitas Madrasah seperti pengadaan gambar-gambar mengenai pembelajaran yang bersifat umum yang ada di dalam kelas. Dalam hal ini biasanya pengawasan berupa mengikuti rapat tahunan yang diselenggarakan oleh madrasah sehingga upaya evaluasi program kerja Madrasah oleh komite dapat tersampaikan melalui musyawarah sesuai dengan apa yang diutarakan Bapak AN selaku ketua komite Madrasah.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit, komite Madrasah juga melakukan berbagai upaya antara lain untuk membina kemampuan internal Komite agar lebih memahami tugas dan fungsi Komite Madrasah terutama dalam hal ini fungsi pengawasan. Agar kedepannya diharapkan segala kebijakan

dan program dari Madrasah sesuai dengan Visi dan Misi Madrasah dan seluruh kegiatan dapat terukur nantinya.

Pengawasan lain yang juga dilakukan oleh komite Madrasah adalah pengawasan terhadap prestasi siswa dan siswi hal ini juga diungkapkan langsung oleh bapak AN selaku ketua Komite yang menyebutkan bahwa Komite Madrasah selalu melakukan pengawasan terhadap tingkat keberhasilan siswa dan siswi baik dari segi akademik maupun non akademik, hal ini tentunya juga berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar serta peran guru dalam hal ini juga sangat memiliki pengaruh besar. Sebagaimana dijelaskan bahwa Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.¹²⁶

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa peran pengawasan komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit bukan hanya seputar fasilitas madrasah tetapi meliputi kebijakan kepala Madrasah, prestasi atau kemampuan Individu siswa dan siswi baik dari segi akademik maupun non akademik, serta pengaruh dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dan siswi. Selain itu keterlibatan komite Madrasah merupakan representatif dari keterlibatan masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Sri Renani Panjastuti tentang dasar keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yaitu tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga

¹²⁶ *Ibid*, h. 47

pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak komite madrasah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit sejatinya selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
2. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya .Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala Madrasah adalah hubungan kerja sama kemitraan ,artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang baik, setiap ada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan musyawarah sehingga bukan hanya melahirkan kerja sama yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonispun menjadi dampak dari pola hubungan kerja tersebut.

3. Pengawasan Partisipasi komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit bukan hanya seputar fasilitas madrasah tetapi meliputi kebijakan kepala Madrasah, prestasi atau kemampuan Individu siswa dan siswi baik dari segi akademik maupun non akademik, serta pengaruh dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dan siswi khususnya di Madrasah Kurnia Hasan Sampit.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan” maka penulis dengan rendah hati menyampaikan beberapa rekomendasi dan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan

Komite Madrasah memiliki peran penting sehingga sekiranya dapat diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan perannya sehingga partisipasi masyarakat dapat tersalurkan melalui komite Madrasah.

2. Bagi Komite Madrasah

Dalam rangka pemberdayaan diri untuk meningkatkan partisipasi akan lebih baik jika Komite Madrasah melakukan evaluasi terhadap perannya selama ini, sudah berapa besar partisipasi yang mampu dilakukan dan apa saja faktor penghambat yang mungkin bisa menjadi kendala saat ini.

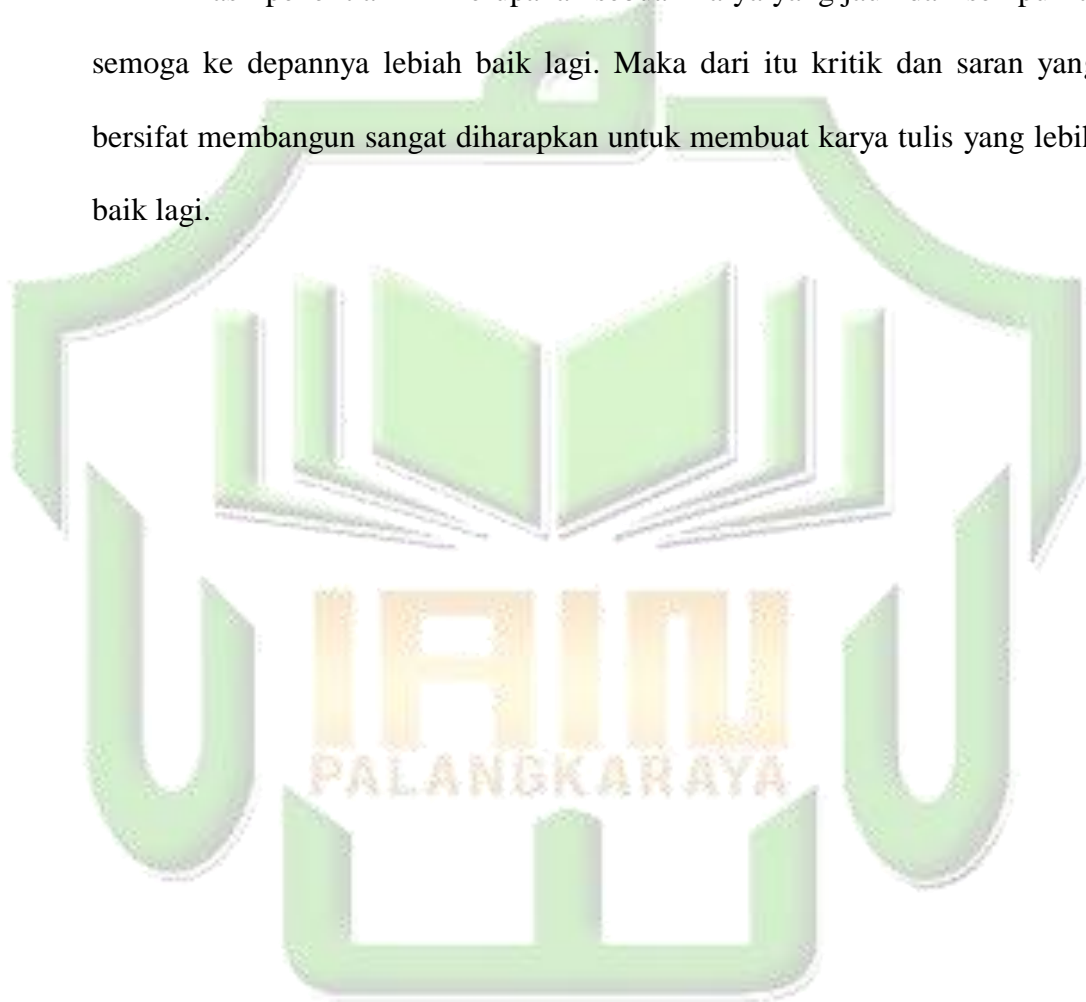
3. Bagi Masyarakat

Pendidikan adalah rahim negara, dimana masa depan bangsa ditentukan melalui kualitas pendidikan. Keberhasilan pendidikan terwujud karena adanya hubungan yang erat antara pihak lembaga pendidikan dan

masyarakat, pendidikan bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas semua elemen masyarakat oleh karena itu kiranya dapat sukarela bergotong-royong mendukung segala program pendidikan dan ikut serta dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Madrasah.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan sebuah karya yang jauh dari sempurna, semoga ke depannya lebih baik lagi. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk membuat karya tulis yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Baedowi dkk. 2015. *Manajemen Madrasah Efektif*. Jakarta: Alvabet.
- Ahmad, A. Kadir. 2003. *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif*. Makassar: CV Indobis Media Center.
- Arikunto, Suharsimi 1996. *Pekerjaan rumahosedur Penelitian Suatu pendekatan Pekerjaan*
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Pekerjaan rumahosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pekerjaan rumahaktik*. Cet. X, Jakarta Rineka Cipta.
- Djam'an Satori, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Fred C. Lunenburg & Allan C. Ornstein. 2011. *Educational Administration Concepts and Practices*. USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irene, A. D. Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta, 2013.
- Khaerudin, dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet.II.3.Januari.
- Khairil Anwar, Ali Sibram Malisi, dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Tesis*, Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya
- Margono, Slamet. 1992. *Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Mikkelsen, Britha. 2005. *Metode Partisipatoris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nanang, Fattah. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pidarta, Made. 1988. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sri Renani Panjastuti dkk. 2008. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publising.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. III; Bandung: Alfabeta.
- Sumojo, Wahjo. 1999. *Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 1996, *KBBI..Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56

B. Jurnal

- Effendi, Ari Khozin. 2015. *Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Dasar (Studi pada SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul Priode Tahun 2007-2014)*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta,
- Hermawan, Y. & Suryono, Y. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3. No. 1,
- Jasmani. 2014. *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Memberdayakan Komite Madrasah*. Disertasi. Malang: UIN Maliki Malang.
- Laksana, N. S. 2013. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten*

Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Lukito, G. A., Suwasrastuti dan Hintono. 2012. *Pengaruh berbagai metode pengasinan terhadap kadar NaCl, kekenyalan dan tingkat kesukaan konsumen pada telur puyuh asin*. *Animal Agriculture Journal*. Vol. 1. No. 1 h. 829-838.

Mariana, D. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan*. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 216-229.

Misbah, “*Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*”, *Insania*, Vol.14 No.1 (Jan-April, 2009), hlm. 3.

Munadi, M. 2008. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kota Surakarta*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 12 No. 2.

Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh, 2014. *Peran Komite Madrasah Dalam Membangun Kewirausahaan (Studi Kasus di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan)*, *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Vol. 3 No.

Pradhan D., Suri K. a, Pradhan D.K. and Biswasroy P., 2013. *Golden Heart of the Nature: Piper betle L.*, *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, Vol. 1 No. 6.

Said Wachdin. 2007. *Kontribusi Komite Madrasah Terhadap Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah di Madrasah Dasar Islam Al-Munawarah Pamekasan*. Tesis. Malang: UIN Maliki Malang.

Selvi Mayarani dan Desi Nurhikmahyanti, 2014. *Pran Komite Madrasah Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Pucung IV Siduarjo*, *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Vol. 4 No. 4 April.

Suroso, Hadi; Hakim, Abdul; Noor, Irwan. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. *Jurnal Wacana*. Vol. 17. No.1. h. 7-15.